



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 26 TAHUN 2018

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA BLITAR
TAHUN 2018 - 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Blitar Tahun 2018 - 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Tengah/Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); ;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3243) ;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) ;

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015 – 2019 ;
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA BLITAR TAHUN 2018 - 2022

Pasal 1

Road Map Reformasi Birokrasi, yang selanjutnya disebut Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Blitar Tahun 2018-2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 2

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Blitar Tahun 2018 - 2022 sebagaimana dalam Pasal 1 berlaku sebagai panduan dalam melaksanakan penyusunan dan evaluasi pelaksanaan program, kebijakan dan kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Blitar Tahun 2018 - 2022.

Pasal 3

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Blitar dapat dilakukan perubahan dan penyesuaian sesuai dengan dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat daerah pada Pemerintah Kota Blitar.

Pasal 4

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 26 Juli 2018
WAKIL WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

SANTOSO

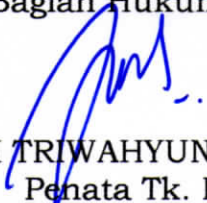
Diundangkan di Kota Blitar
Pada Tanggal 26 Juli 2018
Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.

SUHARSONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2018 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Plh. Kepala Bagian Hukum & Organisasi



SARI TRIWAHYUNI, S.H.
Penata Tk. I
19780420 200501 2 012

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BLITAR

NOMOR : 26 Tahun 2018

TANGGAL : 26 Juli 2018

BAB I

PENDAHULUAN

Road Map Reformasi Birokrasi Kota Blitar adalah rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya dengan sasaran per tahun yang jelas. Dalam konteks upaya pencapaian hasil suatu kegiatan, road map Kota Blitar adalah sebuah dokumen rencana kerja rinci yang mengintegrasikan seluruh rencana dan pelaksanaan program serta kegiatan dalam rentang waktu tertentu. Road Map reformasi birokrasi akan menjadi alat bantu bagi untuk mencapai tujuan penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Kota Blitar.

Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Blitar Tahun 2018 – 2022 merupakan dokumen rencana kerja pelaksanaan reformasi birokrasi yang mengintegrasikan seluruh rencana dan pelaksanaan program serta kegiatan yang di sesuaikan dengan masa kerja Walikota Blitar.

Tujuan penyusunan Road Map reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Blitar adalah untuk memberikan arahan mengenai perubahan yang ingin dilakukan untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi, yaitu:

- a. Menciptakan birokrasi yang bersih dan bebas KKN
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan
- c. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja.

Penyusunan Road Map reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Blitar dilakukan dengan memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan yang dipadukan dengan kemampuan pemerintah Kota dalam memenuhi keinginan dimaksud. Road Map reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Blitar bersifat dinamis, karena memberikan kemungkinan dilakukannya berbagai rencana dan pelaksanaan kegiatan yang dipandang strategis pada tahun-tahun pelaksanaannya.

Pelaksanaan reformasi birokrasi di Kota Blitar merupakan sebuah keharusan yang dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas,

berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi dan memegang teguh nilai – nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Adapun area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi meliputi seluruh aspek manajemen pemerintahan, yaitu :

1. Organisasi : Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing)
2. Tatalaksana : Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip – prinsip good governance
3. Peraturan Perundang – undangan : Regulasi yang tidak tumpang tindih dan harmonis, serta mendorong pencapaian kinerja pemerintahan
4. Sumber Daya Manusia Aparatur : SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera
5. Pengawasan : Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
6. Akuntabilitas : Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja birokrasi
7. Pelayanan publik : Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat dan dunia usaha
8. Pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set) aparatur

Keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi pada 8 area perubahan dapat diukur melalui komponen hasil reformasi birokrasi yang ditandai dengan meningkatnya :

- a. Nilai akuntabilitas kinerja (SAKIP);
- b. Nilai kapasitas organisasi (survei internal);
- c. Indeks survei eksternal persepsi korupsi;
- d. Indeks survei eksternal pelayanan publik;
- e. Opini BPK atas LKPD;
- f. Persentase kepatuhan LHKPN dan LHKASN;

Secara umum Road Map reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Blitar berisi uraian mengenai gambaran kondisi pemerintah Kota Blitar saat ini, kondisi yang diharapkan di masa mendatang, permasalahan yang dihadapi serta agenda pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi serta dalam rangka mewujudkan sasaran reformasi birokrasi.

BAB II

GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH KOTA BLITAR

A. Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Daerah

Momentum reformasi birokrasi menuntut Pemerintah Kota Blitar dan seluruh elemen organisasi pearangkat daerah untuk bergerak cepat merespon dinamika masyarakat. Organisasi birokrasi dituntut profesional, efektif dan efisien dalam melaksanakan fungsi dan tugas pokoknya untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran-sasaran strategisnya guna melayani masyarakat.

Untuk mewujudkan misi ke enam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2016-2021, yaitu **“Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan profersional “** strategi yang dipilih adalah meningkatkan profesional birokrasi dan memantapkan kualitas layanan pemerintah. Dengan birokrasi yang profesional diharapkan pemerintah Kota Blitar dapat mengelola tata pemerintahan yang profesional dan akuntabel dalam mewujudkan Clean Government dan Good Government. Kebijakan umum untuk mendukung tercapainya strategi tersebut adalah :

- a. Peningkatan kelembagaan dan sistem informasi manajemen pemerintah daerah
- b. Peningkatan kualitas pengawasan internal
- c. Peningkatan kuantitas dan kualitas dokumen statistik daerah
- d. Peningkatan koordinasi integrasi sinkronisasi dan sinergitas dokumen perencanaan, penganggaran dan pengendalian program
- e. Peningkatan manajemen dan kualitas sumber daya aparatur secara efektif dan efisien
- f. Peningkatan penerapan e – governance
- g. Peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah secara profesional dan terintegrasi
- h. Peningkatan harmonisasi dan sinkronisasi rancangan perda
- i. Peningkatan administrasi kearsipan secara profesional

Pemerintah Kota Blitar pada dasarnya telah melakukan langkah-langkah perubahan untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas KKN, pelayanan yang berkualitas, maupun meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Namun demikian, langkah-langkah yang dilakukan belum sepenuhnya disusun dalam perencanaan yang sistemis dan sinergi serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Untuk menentukan titik awal perubahan yang harus dilakukan, perlu terlebih dahulu diidentifikasi kondisi umum birokrasi saat ini di pemerintah Kota Blitar. Jika dilihat dari sisi sasaran untuk mewujudkan pemerintah daerah yang bersih dan bebas KKN, maka dapat diuraikan berbagai hal yang sudah dicapai oleh pemerintah Kota Blitar, sebagai berikut:

1. BPK telah memberikan opini WTP kepada Pemerintah Kota Blitar selama 8 tahun berturut turut;
2. Dalam rangka transparansi penyelenggara negara, seluruh pejabat yang diwajibkan untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara kepada KPK;
3. Pemerintah Kota Blitar juga sudah mulai menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), yang akan terus dikembangkan ditandai dengan semakin meningkatnya persentase OPD yang tidak mendapat temuan terindikasi kerugian negara/daerah;
4. Pemerintah Kota Blitar juga sudah membuka sarana pengaduan untuk penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN. Penerapan sistem ini dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.

Dalam kaitan dengan sasaran reformasi birokrasi mengenai peningkatan kualitas pelayanan publik, berbagai hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kota Blitar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah Kota Blitar berdasarkan survey kepuasan masyarakat bernilai “baik”;

2. Tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik sesuai UU 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik oleh Ombudsman berada pada zona “hijau” atau tinggi ;
3. Penyederhanaan pelayanan perizinan melalui pelimpahan 65 jenis izin dan 5 non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP.

Sementara dalam kaitan dengan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, berbagai hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kota Blitar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dalam kaitan dengan penerapan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pemerintah Kota Blitar sudah berhasil memperoleh nilai kategori BB;
2. Dalam kaitan dengan penerapan tata kelola birokrasi pemerintah daerah, OPD pada pemerintah Kota Blitar telah mendapatkan hasil penilaian berkategori B dalam penerapan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
3. Nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah Kota Blitar (nilai LPPD) dari kementerian dalam negeri memperoleh nilai sangat tinggi.
4. Penerapan teknologi informasi di Kota Blitar juga sudah dimulai dengan pengembangan e-government. Secara spesifik juga telah dikembangkan E planing, SIPKD, SIAPBD dan E monev untuk mendukung pengelolaan keuangan yang lebih akuntabel;
5. Sebagai implementasi dari Kebebasan Informasi Publik, Pemerintah Kota Blitar juga sudah membentuk Pejabat Penyelenggara Informasi dan Dokumentasi Daerah (PPID Daerah)

Berbagai hal-hal yang sudah dicapai harus terus dipelihara bahkan terus ditingkatkan sehingga dari tahun ketahun masyarakat akan terus merasakan perbaikan dari kinerja Pemerintah Kota Blitar.

B. Kebutuhan/Harapan pemangku kepentingan

Sebagai langkah awal untuk menentukan titik dimulainya pelaksanaan reformasi birokrasi yang lebih sistematis dan sinergi, Pemerintah telah melakukan upaya identifikasi harapan masyarakat. Tujuan dari

identifikasi harapan-harapan pemangku kepentingan adalah agar pelaksanaan reformasi birokrasi berfokus pada kebutuhan pemangku kepentingan. Dalam kaitan dengan sasaran pertama reformasi birokrasi, mewujudkan pemerintah daerah yang bersih dan bebas KKN, harapan-harapan pemangku kepentingan antara lain:

1. Integritas dan profesionalisme ASN. Harapan ini tampaknya memberikan indikasi bahwa masyarakat sangat mendambakan para birokrasi yang jujur, penuh pengabdian, dan memiliki kompetensi yang diperlukan dalam memberikam pelayanan;
2. Pemimpin daerah, termasuk para pejabat di lingkungan pemerintah Kota Blitar diharapkan dapat menjadi teladan dalam berbagai tindakan atau bahkan menjadi penggerak penyelenggara pemerintah yang bersih dan bebas KKN;
3. Dari pihak pemangku kepentingan internal pemerintah Kota Blitar, umumnya mengharapkan adanya peningkatan kesejahteraan pegawai negeri sebagai bagian dari upaya mengurangi atau menghilangkan tindakan-tindakan yang terkait dengan KKN, dan
4. Meningkatkan level kapabilitas APIP dari level 2 ke level 3, serta
5. Terbangunnya Sistem aplikasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan yang bisa diakses Perangkat Daerah untuk percepatan pemantauan dan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan

Harapan pemangku kepentingan terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan, antara lain:

1. Perubahan budaya melayani di seluruh level unit pelayanan atau bahkan pada seluruh OPD. Seluruh jajaran pejabat diharapkan dapat menerapkan budaya yang mengutamakan kebutuhan masyarakat dalam melaksanakan tugasnya;
2. Penegakan *reward* dan *punishment* secara tegas untuk mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan. Pemberian reward bagi unit pelayanan yang menunjukkan kinerja pelayanan yang baik terhadap masyarakat, dan memberikan hukuman yang proporsional kepada

pejabat yang memimpin unit pelayanan jika tidak dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat;

3. Perlu dilakukan percepatan realisasi transparansi dan kemudahan pada beberapa layanan publik secara online;
4. Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penyederhanaan dan deregulasi perizinan usaha dan penguatan pelayanan terpadu satu pintu.

Harapan pemangku kepentingan terkait dengan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Blitar memiliki potensi untuk memperoleh nilai akuntabilitas sampai pada kategori nilai A;
2. Penerapan tunjangan perbaikan penghasilan berbasiskan e kinerja ;
3. Tidak terdapat duplikasi tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga sumber-sumber dapat dipergunakan secara efisien dan efektif;
4. Penempatan jabatan dilakukan sesuai dengan standar kompetensi dan aturan yang berlaku;
5. Peningkatan Penerapan sistem e government melalui penerapan integrasi aplikasi e government;
6. Aplikasi e-planing disempurnakan dengan menambah fitur-fitur yang dibutuhkan dan mengintegrasikan antara e-planning dan e-budgeting serta e monev;
7. Peningkatan keterbukaan informasi kepada publik, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas berbagai penyelenggaraan pemerintah di Kota Blitar;
8. Peningkatan harmonisasi dan sinkronisasi seluruh rancangan peraturan pada Pemerintah Kota Blitar.

C. Permasalahan birokrasi pemerintah daerah

Meskipun sudah banyak hal yang dicapai, namun demikian masih banyak hal yang masih menjadi permasalahan. Dalam kaitan dengan upaya

mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, berbagai permasalahan yang masih dihadapi antara lain:

1. Pola pikir dan pemahaman para pegawai tentang peran penting penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih dan bebas KKN sebagai salah satu faktor yang menjadi pilar untuk mewujudkan pemerintahan yang baik;
2. Para pejabat umumnya belum dapat memberikan contoh yang dapat menjadi teladan dalam praktik sehari-hari penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN sesuai dengan bidang tugasnya;
3. Penegakan hukum yang masih lemah terhadap pegawai atau pejabat yang melakukan tindakan KKN, sehingga tidak menimbulkan efek jera;
4. Di lain pihak mereka yang memiliki prestasi tidak diberikan reward yang dapat memotivasi semua pegawai atau pejabat untuk melakukan hal-hal yang lebih baik;
5. Salah satu aspek ketidakjelasan mengenai reward dan punishment, adalah karena mekanisme yang ada belum secara optimal dilaksanakan;
6. Pemahaman ASN untuk melaporkan gratifikasi masih kurang

Dalam kaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan, berbagai masalah yang masih dihadapi antara lain:

1. Kurangnya kualitas pelayanan pada sektor-sektor pelayanan dasar pemerintahan menyebabkan masih banyak keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik di Kota Blitar;
2. Pelayanan di Kota Blitar juga dipandang kurang efektif dan memakan waktu yang lama;
3. Belum tersusunya SOP perizinan yang sederhana, cepat tepat pasti dan terintegrasi
4. Tim Teknis masih di OPD masing masing sehingga PTSP belum berjalan optimal;

5. Penyelenggaraan e-Gov belum optimal dalam mendukung transparansi dan kemudahan dalam pemberian layanan

Sementara dalam kaitan dengan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, permasalahan yang masih dihadapi antara lain:

1. Efisiensi penggunaan anggaran untuk seluruh kegiatan yang dilakukan masih perlu ditingkatkan, dan prosentase anggaran perjalanan dinas yang masih besar;
2. Belum terintegrasinya sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (SIP APBD, SIP KD, SIMBADA, SISMIOP, SIB BPHTB) dengan sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Belum tersusunnya aturan tentang Analisis Standar Biaya
4. Kelembagaan pemerintah daerah yang belum sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi;
5. Penempatan pegawai belum dilakukan secara transparan sehingga menimbulkan kemungkinan tindakan penyimpangan yang berakibat pada penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan kebutuhan unit kerja;
6. Penguatan kompetensi jabatan pelaksana dan jabatan fungsional sesuai dengan kompetensi dan beban kerja akibat kurangnya pegawai berdasarkan kebutuhan pegawai;
7. Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM Bidang IT ;
8. Penerapan pakta integritas dan perjanjian kinerja belum sepenuhnya dijalankan dengan baik.

BAB III

AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH

A. Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi

Sesuai dengan kondisi umum sebagaimana diuraikan pada bab sebelumnya, reformasi birokrasi di Pemerintah Kota Blitar difokuskan pada lima fokus perubahan sebagai berikut :

1. Prioritas Pembentukan Manajemen Pemerintahan Daerah

Prioritas ini merupakan fokus perubahan yang menjadi prioritas daerah terkait dengan area perubahan reformasi birokrasi. Area perubahan yang menjadi prioritas untuk diperbaiki melalui reformasi birokrasi meliputi:

a. Sumber Daya Manusia

Berbagai permasalahan dalam area ini antara lain:

- 1) Terdapat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing – masing jabatan sehingga belum sepenuhnya mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
- 2) Pemerintah Kota Blitar juga belum menerapkan sistem Pola karier pegawai yang memberikan kepastian dan kejelasan mengenai karir yang akan ditempuh oleh seorang pegawai;
- 3) Manajemen kinerja pegawai belum sepenuhnya diterapkan;

b. Pengawasan

Berbagai permasalahan dalam area ini antara lain:

- 1) Secara kuantitas dan kualitas aparat pengawas di Pemerintah Kota Blitar masih kurang, terlebih lagi untuk mendukung dan mempertahankan opini WTP serta mengurangi resiko terjadinya penyimpangan sejak dari perencanaan;
- 2) Meskipun SPIP sudah mulai diterapkan tetapi penerapannya belum sepenuhnya maksimal;
- 3) Standard operating procedures belum sepenuhnya dilaksanakan dalam pelaksanaan pengawasan.

c. Tatalaksana

Berbagai permasalahan dalam area ini antara lain:

- 1) Mekanisme koordinasi yang lemah antara OPD dan unit kerja di masing-masing OPD, menyebabkan timbulnya berbagai tumpang tindih pelaksanaan kegiatan yang berakibat pada inefisiensi;
- 2) Meskipun sudah diterapkan sistem sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (SIP APBD, SIP KD, SIMBADA, SISMIOP, SIB BPHTB) akan tetapi belum terintegrasi dengan sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
- 3) Belum ada analisis standar biaya untuk mendorong efisiensi.

2. Prioritas yang harus terus dipelihara.

Selain mengarahkan perubahan untuk menghilangkan berbagai permasalahan birokrasi, reformasi birokrasi juga ditujukan untuk mengembangkan atau memperbaiki berbagai hal yang sudah baik. Fokus pemeliharaan terhadap hal-hal yang sudah baik meliputi antara lain:

- a. Mempertahankan opini WTP dari BPK;
- b. Pemenuhan kewajiban bagi Pimpinan untuk menyerahkan LHKPN;
- c. Penerapan SPIP ;
- d. Penyelesaian pengaduan terkait informasi indikasi terjadinya KKN;
- e. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah Kota Blitar berdasarkan survey kepuasan masyarakat bernilai “baik”
- f. Tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik sesuai UU 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik oleh Ombudsman berada pada zona “hijau” atau tinggi;
- g. Penyederhanaan pelayanan perizinan;
- h. Penerapan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pemerintah Kota Blitar;
- i. Nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah Kota Blitar (nilai LPPD) dari kementerian dalam negeri memperoleh nilai sangat tinggi;

3. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan.

Prioritas ini menyangkut 2 (dua) fokus, yaitu:

Pertama, pelayanan sektor-sektor tertentu yang strategis dan memerlukan jangka waktu secara bertahap untuk melakukan peningkatan kualitasnya.

Sektor-sektor yang menjadi prioritas peningkatan kualitas pelayanannya di Pemerintah Kota Blitar adalah sebagai berikut:

a. Pengembangan Teknologi Aplikasi dan Infrastruktur E government

Jenis pelayanan pada sektor ini yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya adalah : **Penyelenggaraan e-Gov dalam mendukung transparansi dan kemudahan dalam pemberian layanan**. Pada zaman teknologi informasi saat ini penyelenggaraan e government perlu dilakukan percepatan realisasi transparansi dan kemudahan pada beberapa layanan publik secara online. Untuk itu perlu segera dibangun sistem berbasis aplikasi yang terintegrasi. Beberapa hal yang perlu segera dilakukan adalah: Tersusunnya Peraturan Walikota tentang tata kelola teknologi, Tersedianya data Identifikasi ulang aplikasi yang dimiliki oleh OPD, seluruh OPD telah terhubung dengan jaringan internet/intranet melalui kabel FO, Tersedianya ruang server untuk meletakkan server seluruh OPD.

b. Pelayanan Perizinan

Sektor ini selalu menjadi sorotan masyarakat, karena banyak keluhan disampaikan masyarakat terkait dengan proses, maupun biaya resmi dan tidak resmi yang harus dikeluarkan dalam memperoleh pelayanan. Untuk meningkatkan pelayanan perizinan perlu dilakukan penguatan kelembagaan PTSP serta penyederhanaan prosedur dan persyaratan dengan menyusun SOP yang terintegrasi terhadap beberapa jenis pelayanan perizinan yang menjadi prioritas untuk diperbaiki baik dari sisi kecepatan, kepastian hukum, kejelasan proses dan biaya, misal :

- 1) IMB
- 2) Ijin Prinsip;
- 3) Ijin Jasa Usaha
- 4) Ijin Operasional
- 5) Ijin Pemanfaatan Kekayaan daerah

Kedua, Quick Wins.Jenis pelayanan yang akan dijadikan *Quick Wins* adalah jenis pelayanan yang secara cepat dapat diperbaiki kualitas pelayanannya dan memberikan dampak positif pada upaya reformasi birokrasi yang sedang dilakukan oleh pemerintah Kota Blitar. Beberapa jenis pelayanan yang dipilih menjadi *quick wins*, dengan pertimbangan :

- a. Dapat dilakukan perubahan untuk memperbaiki kualitas pelayanan, cepat diterapkan, dan masyarakat akan dapat merasakan perubahan yang signifikan;
- b. Perubahan terhadap kualitas pelayanan ini akan memberikan dampak positif terhadap citra pelaksanaan reformasi birokrasi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Kota Blitar;
- c. Pemerintah Kota Blitar saat ini memiliki kapasitas yang cukup memadai untuk melakukan langkah-langkah perubahan yang cepat untuk jenis pelayanan yang dipilih menjadi *quick wins*.

Adapun jenis-jenis pelayanan yang menjadi *quick wins* adalah sebagai berikut:

- a. *Pilot Project* Pengembangan sistem e gov yang terintegrasi antara e planning dan e budgeting
- b. Penerapan PTSP secara efektif, murah, cepat dan mudah (Penerapan *Quick wins* ini dilakukan bersamaan dengan perbaikan kualitas pelayanan pada sektor Pelayanan Perijinan sebagaimana menjadi prioritas sektor)

4. Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

Sebagai contoh pelaksanaan reformasi birokrasi di pemerintah Kota Blitar, OPD yang direncanakan ditetapkan menjadi zona integritas adalah :

- a. Kecamatan Kepanjenkidul;
- b. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja;
- c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- d. RSD Mardi Waluyo.

Kecamatan Kepanjenkidul dipandang memenuhi syarat ditetapkan sebagai wilayah bebas korupsi/ wilayah birokrasi bersih melayani karena memenuhi syarat yaitu pertama ; merupakan unit yang penting

/ strategis dalam melakukan pelayanan publik karena merupakan unit terendah yang langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat dan kedua mengelola sumber daya yang cukup besar karena Kecamatan Kepanjenkidul membawahi 7 kelurahan. Selain paling banyak memenuhi kriteria Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Kecamatan Kepanjenkidul juga mendapat tugas menjadi OPD yang menangani salah satu prioritas peningkatan pelayanan, yaitu memperoleh predikat baik dalam hal survey kepuasan masyarakat.

Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja; Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta RSD Mardi Waluyo dipandang sebagai unit kerja yang akan banyak berperan dalam mengawal pelaksanaan pelayanan publik di Kota Blitar. Karena itu harus benar-benar memiliki kesiapan lebih baik dari unit kerja lainnya.

5. Prioritas OPD, yaitu fokus perubahan yang menjadi prioritas masing-masing OPD. Fokus perubahan ini harus menjadi perhatian SKPD dan membuat rencana aksi tersendiri dan menjadi bagian dari reformasi birokrasi pemerintah Kota Blitar. Prioritas yang telah berhasil diidentifikasi dalam proses bersama para pemangku kepentingan meliputi:

a. Peningkatan tata kelola birokrasi pemerintah daerah

Tata kelola Birokrasi harus mampu menyediakan informasi yang transparan dan akuntabel. Dalam kaitan ini, prioritas yang dilaksanakan adalah penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja melalui penyusunan proses bisnis dan penerapan sistem kearsipan yang handal.

b. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah

Prioritas lain dalam sektor perencanaan adalah penyediaan dokumen statistik daerah baik secara kualitas maupun kuantitas, peningkatan koordinasi dan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas dokumen perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program.

SKPD yang bertanggungjawab atau terkait dengan prioritas ini, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik akan menjadi SKPD yang berada digaris depan untuk

melakukan perubahan-perubahan melalui langkah-langkah konkrit sebagaimana direncanakan dalam dokumen ini.

c. Peningkatan Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam rangka pembiayaan pembangunan di Kota Blitar diperlukan sumber dana lain selain DAU oleh karena itu peningkatan PAD menjadi salah satu prioritas. Untuk itu diperlukan kreatifitas dan inovasi untuk memperoleh tambahan PAD dari pajak maupun retribusi daerah. Selain itu peningkatan pengelolaan keuangan dan aset daerah secara profesional dan terintegrasi merupakan keharusan bagi birokrasi yang akuntabel.

d. Penyediaan Sarana dan Prasarana Publik

Beberapa jenis pelayanan pada sektor ini yang menjadi prioritas untuk ditingkatkan kualitas pelayanannya adalah:

1) Jalan Prioritas lain yang menjadi perhatian pemerintah Kota Blitar adalah penyediaan jalan. Penyediaan dan atau perbaikan sarana jalan ini sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kemajuan Kota Blitar.

2) Penyediaan Drainase

Penyediaan dan perbaikan drainase menjadi prioritas, agar tidak terjadi banjir yang merugikan masyarakat.

3) Penyediaan dan Perbaikan Ruang Terbuka Hijau

Salah satu aspek penting yang harus disediakan oleh pemerintah daerah adalah adanya ruang terbuka hijau, yang menjadi tempat berekreasi, bermain dan melakukan berbagai kegiatan lain bagi masyarakat. Penyediaan ruang terbuka hijau, selain memperindah daerah, menjaga lingkungan juga akan mendorong komunikasi informasi dan kreativitas seluruh lapisan masyarakat.

4) Penyediaan dan perbaikan rumah sakit umum

Pelayanan dasar kesehatan bagi masyarakat berupa penyediaan atau perbaikan rumah sakit umum yang sudah ada, menjadi bagian harus terus dilakukan oleh pemerintah daerah. Perbaikan yang dilakukan secara terus menerus, disertai dengan peningkatan kualitas pelayanannya akan meningkatkan

kepercayaan masyarakat kepada pemerintah terutama dalam kaitan penyediaan layanan dasar kesehatan.

e. Peningkatan kemandirian ekonomi yang berorientasi pada industri pariwisata dan ekonomi kreatif

Dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi masyarakat akan sangat efektif menanggulangi kemiskinan dan akan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Untuk itu perlu memantapkan pembangunan industri pariwisata daerah dan ekonomi kreatif melalui program mayajuwita (masyarakat berdaya menuju pariwisata). Program ini membutuhkan inovasi dari masing – masing kelurahan sehingga masyarakat akan ikut serta secara langsung membangun pariwisata di Kota Blitar

Prioritas SKPD sebagaimana diuraikan di atas akan menjadi bagian dari upaya perbaikan yang dilakukan oleh SKPD yang bertanggungjawab menangani pelayanan dimaksud. Karena itu, setiap SKPD harus memiliki rencana aksi yang jelas dan terukur untuk mendukung perbaikan fokus perubahan ini.

B. Sasaran

Sasaran dapat dibagi ke dalam fokus perubahan untuk Prioritas Pembinaan Manajemen Pemerintah Daerah, Prioritas yang harus terus dipelihara dan Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan. Adapun sasaran dan indikator kinerja dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Prioritas Pembinaan Manajemen Pemerintah Daerah

a. SDM

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	73	75	78	80	83
	Persentase ASN yang mengikuti diklat teknis/fungsional	55%	65%	75%	85%	85%

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
	dan struktural					
	Presentase ASN yang ditempatkan dan dipromosikan sesuai dengan kompetensi	80%	85%	90%	95%	95%
Meningkatnya kinerja pegawai	Persentase pegawai yang capaian kinerjanya sesuai target	70%	75%	80%	85%	90%
	Persentase kepatuhan pegawai untuk memenuhi: <ul style="list-style-type: none"> • Aturan disiplin • Penyampaian LHKPN 	70% (rata-rata)	75% (rata-rata)	80% (rata-rata)	85% (rata-rata)	90% (rata-rata)
	Persentase ASN yang menyusun SKP sesuai standart	10%	15%	30%	50%	50%
Meningkatnya kesejahteraan pegawai	Indeks kepuasan pengguna layanan	baik	baik	baik	baik	baik

b. Pengawasan

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya kualitas dan kuantitas aparat pengawas	Persentase pengawas/auditor yang lulus sertifikasi	8	12	16	20	20
	Persentase aparat pengawas yang memperoleh peningkatan kompetensi	70%	80%	90%	100%	100%
Meningkatnya	Persentase	80%	85%	87%	90%	100%

pengawasan internal yang berkualitas	rekomendasi hasil audit yang selesai ditindaklanjuti					
	Persentase laporan keuangan SKPD yang telah direviu	35%	45%	60%	70%	80%
	Persentase SKPD yang tidak mendapat temuan berindikasi kerugian negara/daerah	75%	77,5%	80%	80%	80%

c. Tatalaksana

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya koordinasi antar SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi	Persentase OPD yang melaksanakan standar pelatanaan (SPP dan SOP)	85%	90%	95%	100%	100%
	Persentase OPD / Unit kerja yang tepat fungsi dan tepat ukuran	80 %	85%	90%	95%	100%
Meningkatnya penerapan teknologi informasi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi	Persentase OPD yang melaksanakan integrasi aplikasi e government	50%	65%	80%	95%	95%
	Persentase tersusunnya Analisis Standar Biaya Semester I dan Semester II sesuai aturan perundangan	100%	100%	100%	100%	100%
	Prosentase data statistik yang	75%	80%	80%	80%	80%

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
	terlayani melalui e governance					

2. Prioritas yang harus terus dipelihara

a. Mempertahankan opini WTP dari BPK

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Diperolehnya Opini WTP dari BPK	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

b. Pemenuhan kewajiban bagi Pimpinan untuk menyerahkan LHKPN

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya Pejabat yang menyerahkan LHKPN	Persentase pejabat yang telah menyerahkan LHKPN	80%	95%	100%	100%	100%

c. Penerapan SPIP

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya penerapan SPIP	Persentase OPD yang telah menerapkan SPIP pada level terdefinisi	40%	60%	80%	100%	100%

d. Penyelesaian pengaduan terkait informasi indikasi terjadinya KKN

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya penyelesaian pengaduan terkait informasi indikasi terjadinya KKN	Persentase pengaduan masyarakat terkait informasi indikasi terjadinya KKN yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik	95 %	96%	97%	98%	100%

e. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Hasil survey kepuasan masyarakat atas layanan publik	baik	baik	baik	Sangat baik	sangat baik

f. Nilai Tingkat Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik sesuai UU 25 Tahun 2009

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya kepatuhan terhadap standar pelayanan publik sesuai UU 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik	Hasil nilai tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik sesuai UU 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik	hijau	hijau	hijau	hijau	hijau

g. Nilai akuntabilitas kinerja kategori A

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja pemerintah Kota Blitar	Nilai SAKIP Kota Blitar	BB	BB	BB	A	A

h. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Kota Blitar (Nilai LPPD)

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Nilai LPPD Pemerintah Kota Blitar	Sangat tinggi	Sangat tinggi	Sangat tinggi	Sangat tinggi	Sangat tinggi

3. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan

a. Pengembangan Teknologi Aplikasi dan Infrastruktur E government

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik	Persentase ketersediaan layanan aplikasi e gov pada perangkat daerah	31,11 %	35,56 %	40%	45%	50%
	Persentase Informasi pemerintah yang terfasilitasi keamanan informasi	100%	100%	100%	100%	100%

b. **Pelayanan Perizinan**

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya kualitas pelayanan publik di bidang pelayanan perizinan	Survey kepuasan masyarakat (SKM) Pelayanan Perizinan	baik	baik	baik	baik	baik
	Persentase persyaratan perizinan yang disederhanakan	70%	80%	80%	80%	80%

1) **Quick Wins**

- (a). *Pilot Project* Pengembangan sistem e gov yang terintegrasi antara e planning dan e budgeting

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Percepatan realisasi tersedianya sistem aplikasi e-Planning yang terintegrasi dengan e-Budgeting	Persentase tercapainya pengintegrasian e-planning dengan e-budgeting	70%	80%	90 %	100%	100%

- (b). Penerapan dan Penguatan PTSP

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya kualitas dan kuantitas petugas pelayanan	Persentase Tim Teknis yang memperoleh peningkatan kompetensi	70%	80%	85%	90%	100%

	Persentase petugas pelayanan yang memperoleh peningkatan kompetensi	70%	80%	85%	90%	100%
	Ratio petugas PTS P dengan jumlah izin yang dilimpahkan	1:11	1:10	1:10	1:10	1:10

4. Zona Integritas menuju WBK/WBBM

Sasaran	Indikator	Target				
		2018	2019	2020	2021	2022
Meningkatnya Unit Kerja yang ditetapkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM	Jumlah Unit Kerja yang ditetapkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM	1	1	1	1	1

5. Prioritas SKPD

Sasaran maupun target-target diserahkan kepada masing-masing SKPD yang bertanggungjawab dan SKPD yang terkait sebagai rangkaian dari penyusunan rencana aksi SKPD dimaksud dalam melakukan reformasi birokrasi.

C. Kegiatan-kegiatan

1. Prioritas Pembinaan Manajemen Pemerintah Daerah

a. SDM

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan target-target pada area perubahan ini meliputi:

- 1) Melakukan analisis jabatan;
- 2) Melakukan analisis beban kerja;
- 3) Merumuskan ulang atau memperbaiki standar kompetensi jabatan untuk seluruh jabatan di OPD sesuai dengan kebutuhan organisasi yang telah ditetapkan;
- 4) Merumuskan rencana kebutuhan pegawai sesuai dengan

beban kerja dan kompetensi yang dibutuhkan masing-masing OPD, termasuk rencana rekrutmen setiap tahun dan lima tahunan.

- 5) Memperbaiki sistem rekrutmen pegawai;
- 6) Melaksanakan rekrutmen sesuai sistem rekrutmen baru dan kebutuhan rekrutmen pegawai setiap tahun sesuai dengan rencana kebutuhan dan kompetensi;
- 7) Melaksanakan sistem rekrutment terbuka untuk jabatan-jabatan tertentu;

Catatan: Kegiatan 1) sampai dengan 7) merupakan prioritas jangka pendek yang juga menjadi prioritas nasional.

- 8) Melakukan assessment kompetensi terhadap seluruh pegawai untuk mengetahui peta potensi terkini;
- 9) Menyusun kebutuhan dan rencana pengembangan pegawai, meliputi kepemimpinan, managerial, fungsional dan teknis;
- 10) Melaksanakan pengembangan pegawai sesuai rencana pengembangan pegawai;
- 11) Menyusun rencana penempatan dan pola karier pegawai, termasuk pola karier jabatan fungsional;
- 12) Melaksanakan rencana penempatan dan pola karier pegawai;
- 13) Menyusun sistem manajemen kinerja pegawai termasuk sistem penilaian prestasi kerja pegawai;
- 14) Menerapkan sistem manajemen kinerja pegawai, termasuk pengembangan sistem penilaian prestasi kerja pegawai;
- 15) Mensosialisasikan berbagai kebijakan kepegawaian dan merencanakan penerapannya;
- 16) Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- 17) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- 18) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

b. Pengawasan

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan target-target pada area perubahan ini meliputi:

- 1) Menyusun kebutuhan jumlah auditor dan P2UPD sesuai dengan beban kerja;
- 2) Merencanakan pengembangan pegawai untuk memenuhi kebutuhan auditor dan P2UPD setiap tahun;
- 3) Merencanakan peningkatan upaya penerapan SPIP;

- 4) Melaksanakan penerapan SPIP
- 5) Melaksanakan pengembangan pegawai untuk memenuhi kebutuhan auditor dan P2UPD setiap tahun, mempertahankan opini WTP dari BPK, dan penerapan SPIP;
- 6) Memperbaiki SOP pengawasan;
- 7) Menerapkan SOP Pengawasan;
- 8) Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- 9) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- 10) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan;

c. Tatalaksana

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan target-target pada area perubahan ini meliputi:

- 1) Memetakan proses bisnis penyelenggaraan pemerintah Kota Blitar;
- 2) Menyusun mekanisme kerja penyelenggaraan pemerintah Kota Blitar (penataan terhadap tumpang tindih tugas dan fungsi);
- 3) Menyusun SOP;
- 4) Melaksanakan pengembangan dan penerapan teknologi informasi pada sektor-sektor yang belum menerapkan;
- 5) Menerapkan keterbukaan informasi publik;
- 6) Menyusun pedoman standarisasi fasilitas kantor;
- 7) Menerapkan standart analisa biaya;
- 8) Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- 9) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- 10) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

2. Prioritas yang harus terus dipelihara

a. Mempertahankan opini WTP dari BPK

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mempertahankan opini WTP dari BPK meliputi:

- 1) Menyusun rencana monitoring pengelolaan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengelolaan barang milik negara, penyusunan laporan keuangan;

- 2) Mensosialisasikan tertib administrasi keuangan;
- 3) Meningkatkan kompetensi para pengelola keuangan;
- 4) Melaksanakan rencana monitoring sesuai jadwal;
- 5) Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- 6) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- 7) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

b. Pemenuhan kewajiban bagi Pimpinan untuk menyerahkan LHKPN

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka Pemenuhan kewajiban bagi Pimpinan untuk menyerahkan LHKPN meliputi:

- 1) Melakukan sosialisasi tentang LHKPN;
- 2) Melakukan asistensi penyusunan LHKPN;
- 3) Memonitor penyerahan LHKPN untuk pejabat yang diwajibkan.
- 4) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

c. Penerapan SPIP

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka Penerapan SPIP meliputi:

- 1) Menyusun rencana monitoring penerapan SPIP;
- 2) Mensosialisasikan penerapan SPIP;
- 3) Meningkatkan pembinaan SPIP kepada OPD;
- 4) Melaksanakan rencana monitoring sesuai jadwal;
- 5) Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- 6) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- 7) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

d. Penyelesaian pengaduan terkait informasi indikasi terjadinya KKN

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka Penyelesaian pengaduan terkait informasi indikasi terjadinya KKN meliputi:

- 1) Merencanakan pengembangan sarana pengaduan;
- 2) Menetapkan pengelola sarana pengaduan;

- 3) Mensosialisasikan pentingnya keterbukaan informasi publik;
- 4) Meningkatkan kompetensi para pengelola pengaduan;
- 5) Mengelola pengaduan;
- 6) Memonitor tindak lanjut pengaduan;
- 7) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- 8) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan

e. Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah Kota Blitar berdasarkan survey kepuasan masyarakat bernilai “baik”

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan meliputi:

- 1) Menyusun rencana monitoring pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Mensosialisasikan pelayanan prima kepada seluruh OPD;
- 3) Meningkatkan kompetensi para pengelola pelayanan publik;
- 4) Melaksanakan rencana survey kepuasan masyarakat sesuai jadwal;
- 5) Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana survey kepuasan masyarakat;
- 6) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- 7) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

f. Tingkat kepatuhan terhadap standar pelayanan publik sesuai UU 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik oleh Ombudsmen berada pada zona “hijau” atau tinggi ;

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan, meliputi:

- 1) Mengidentifikasi OPD yang belum melaksanakan standar pelayanan publik sesuai UU 25 tahun 2009 ;
- 2) Membentuk Tim Pembina Pelayanan Publik di tingkat Kota untuk melakukan pembinaan kepada OPD ;
- 3) Mensosialisasikan standar pelayanan publik sesuai UU 25 tahun 2009 kepada seluruh OPD;
- 4) Meningkatkan kompetensi para pengelola pelayanan publik;
- 5) Melaksanakan rencana monitoring secara berkelanjutan;

- 6) Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- 7) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- 8) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

g. Penerapan sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), pemerintah Kota Blitar.

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mempertahankan atau meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja menjadi A, meliputi:

- 1) Melakukan review terhadap rencana strategis, termasuk berbagai indikator kinerja untuk memastikan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran;
- 2) Menyusun rencana perbaikan sistem manajemen kinerja;
- 3) Memperbaiki berbagai aspek dalam sistem manajemen kinerja untuk memastikan pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran;
- 4) Memadukan perjanjian kinerja dengan sistem penilaian prestasi kerja pegawai;
- 5) Mengembangkan, memperbarui, mengumpulkan dan mengelola data kinerja serta sistem pelaporannya;
- 6) Menyusun mekanisme internal dalam rangka monitoring dan evaluasi akuntabilitas kinerja;
- 7) Melakukan self assessment terhadap penilaian akuntabilitas kinerja;
- 8) Memonitor pelaksanaan rencana;
- 9) Melakukan evaluasi;
- 10) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

h. Nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah Kota Blitar (nilai LPPD) dari kementerian dalam negeri memperoleh nilai sangat tinggi Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan, meliputi:

- 1) Menyusun rencana penerapan SPM ;
- 2) Mensosialisasikan penerapan SPM;
- 3) Meningkatkan pembinaan kepada OPD tentang penyediaan data yang valid;
- 4) Melaksanakan rencana monitoring sesuai jadwal;
- 5) Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana;
- 6) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana;

- 7) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

3. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan

a. Pengembangan Teknologi Aplikasi dan Infrastruktur E government

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka Pengembangan Teknologi Aplikasi dan Infrastruktur E government meliputi:

- 1) Tersusunnya Peraturan Walikota tentang tata kelola teknologi informai dan komunikasi;
- 2) Tersedianya data Identifikasi ulang aplikasi yang dimiliki oleh setiap OPD;
- 3) Seluruh OPD telah terhubung dengan jaringan internet/intranet melalui kabel FO;
- 4) Tersedianya ruang server untuk meletakkan server seluruh OPD;
- 5) Terintegrasinya aplikasi yang dimiliki seluruh OPD
- 6) Melakukan evaluasi pelaksanaan Pengembangan Teknologi Aplikasi dan Infrastruktur E government;
- 7) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

b. Pelayanan Perizinan

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan perizinan meliputi:

- 1) Tersusunnya revisi SOP yang sederhana, cepat tepat pasti dan murah;
- 2) Terbentuknya SK Tim Teknis dan Penguatan Tupoksi;
- 3) Coaching klinik PTSP dari Kemendagri tentang kedudukan dan peran Tim Teknis
- 4) Terintegrasinya Aplikasi On line & Transaksi Non Tunai;
- 5) Peningkatan pengetahuan dan ketrampilan petugas pelayanan

1) Quick Wins

- (a). *Pilot Project* Pengembangan sistem e gov yang terintegrasi antara e planning dan e budgeting

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka *Pilot Project* Pengembangan sistem e gov yang terintegrasi antara e planning dan e budgeting, meliputi:

- (1). Updating Fitur menu E planning (fitur Musyawarah kelurahan dan musyawarah Kecamatan);
 - (2). Sosialisasi dan Uji coba fitur Musrenbang Kelurahan dan kecamatan;
 - (3). Penyempurnaan Fitur E planning (musren Kelurahan dan Musren Kecamatan);
 - (4). Updating Fitur menu E planning (fitur Musrenbang Kota, RENJA - RKPD);
 - (5). Sosialisasi dan Uji coba fitur Musrenbang Kota, RENJA – RKPD
 - (6). Penyempurnaan Fitur Musrenbang Kota, RENJA – RKPD
 - (7). Updating Fitur menu Eplanning (fitur KUA - PPAS)
 - (8). Sosialisasi dan Uji coba fitur KUA – PPAS
 - (9). Penyempurnaan Fitur KUA – PPAS
 - (10). Integrasi Eplanning dan Ebudgeting (Pendampingan)
 - (11). Penyempurnaan integrasi Eplanning - Ebudgeting (pendampingan)
 - (12). Pendampingan Operasional Eplanning
 - (13). Penerapan sistem;
 - (14). Monitoring
 - (15). Evaluasi
 - (16). Tindak lanjut perbaikan;
- (b). Penerapan dan penguatan PTSP
- (1). Melakukan telaahan penerapan dan penguatan PTSP (mencakup terhadap kelembagaan, mekanisme koordinasi dan hubungan kerja, prosedur pelayanan, jenis pelayanan yang dapat diintegrasikan, pengaturan kewenangan dan diskresi, kebutuhan SDM, penerapan teknologi informasi, lokasi, sarana dan prasarana, kompetensi pegawai, perubahan peraturan perundang-undangan yang dianggap menghambat/menjadi kendala, dan lainnya);
 - (2). Memilih jenis pelayanan yang dapat diintegrasikan dalam PTSP;
 - (3). Menyusun rancangan penerapan dan penguatan PTSP;
 - a. Menyusun Peraturan Daerah/Peraturan Walikota tentang petunjuk teknis dari 20 sektor perizinan

- OSS yang terdiri dari 114 izin usaha, 370 izin komersial / operasional dan 3 jenis pendaftaran
- b. Menyusun Peraturan Walikota tentang pelimpahan kewenangan perizinan
 - c. Coaching klinik penguatan peran OPD back office dalam pelayanan izin OSS
 - d. Diklat /Bintek penguatan pengetahuan aplikatif OSS kepada petugas PTSP
- (4). Melakukan uji coba;
 - (5). Menyempurnakan PTSP hasil uji coba;
 - (6). Menerapkan PTSP untuk jenis pelayanan tertentu;
 - (7). Melaksanakan monitoring;
 - (8). Melaksanakan evaluasi;
 - (9). Melaksanakan tindaklanjut hasil monitoring dan evaluasi;
 - (10). Mengembangkan PTSP untuk jenis-jenis pelayanan lain.

2) Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka penerapan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani meliputi:

- (a). Penyiapan Kecamatan Kepanjenkidul, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta RSD Mardi Waluyo sebagai unit yang ditetapkan untuk Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;
- (b). Pencanaan rencana Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;
- (c). Pelaksanaan pendampingan 4 OPD untuk penilaian Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;
- (d). Monitoring
- (e). Evaluasi
- (f). Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

Secara umum kegiatan-kegiatan di atas dapat diklasifikasikan ke dalam program-program sebagai berikut:

Program		Kegiatan
1.	Peningkatan Manajemen	1) Analisis Jabatan

Program	Kegiatan
SDM Aparatur	<p>2) Analisis beban Kerja</p> <p>3) Penyusunan ulang/penyempurnaan standar kompetensi jabatan untuk seluruh jabatan di OPD sesuai dengan kebutuhan organisasi yang telah ditetapkan;</p> <p>4) Merumuskan rencana kebutuhan pegawai sesuai dengan beban kerja dan kompetensi yang dibutuhkan masing-masing OPD, termasuk rencana rekrutmen setiap tahun dan lima tahunan</p> <p>5) Penyempurnaan sistem rekrutmen pegawai</p> <p>6) Pelaksanaan rekrutmen dengan sistem baru dan kebutuhan rekrutmen pegawai setiap tahun sesuai dengan rencana kebutuhan dan kompetensi;</p> <p>7) Penerapan sistem rekrutmen terbuka untuk jabatan-jabatan tertentu</p> <p>8) Pelaksanaan assessment kompetensi terhadap seluruh pegawai</p> <p>9) Penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan pegawai, meliputi kepemimpinan, managerial, fungsional dan teknis</p> <p>10) Pelaksanaan pengembangan pegawai sesuai rencana pengembangan pegawai;</p> <p>11) Penyusunan rencana penempatan dan pola karier pegawai</p> <p>12) Penyusunan sistem manajemen kinerja pegawai termasuk sistem penilaian prestasi kerja pegawai;</p> <p>13) Penerapan sistem manajemen kinerja pegawai termasuk pengembangan sistem penilaian prestasi kerja pegawai;</p>
	<p>14) Sosialisasi berbagai kebijakan kepegawaian dan merencanakan penerapannya</p> <p>15) Monitoring</p> <p>16) Evaluasi</p> <p>17) Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan</p>

	Program	Kegiatan
		evaluasi 18) Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Peningkatan Manajemen SDM Aparatur Pemerintah Kota Blitar.
2.	Penguatan Pengawasan	1) Penyusunan kebutuhan tenaga auditor dan P2UPD (diintegrasikan dengan kegiatan nomor 2 dan 4 dalam Program SDM) 2) Penyusunan rencana pengembangan auditor dan P2UPD (diintegrasikan dengan kegiatan nomor 9 dalam Program SDM) 3) Penyusunan rencana peningkatan penerapan SPIP 4) Penerapan SPIP 5) Pengembangan auditor dan P2UPD (diintegrasikan dengan kegiatan nomor 9 Program SDM) 6) Penyusunan rencana monitoring pengelolaan keuangan untuk seluruh SKPD 7) Sosialisasi tertib administrasi keuangan; 8) Pelaksanaan monitoring pengelolaan keuangan di SKPD 9) Sosialisasi LHKPN 10) Asistensi penyusunan LHKPN bagi pejabat; 11) Penyusunan rencana pengembangan sarana pengaduan penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN 12) Penerapan sarana pengaduan penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN 13) Tindak lanjut pengaduan informasi indikasi terjadinya KKN 14) Monitoring 15) Evaluasi 16) Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan

	Program	Kegiatan
		evaluasi 17) Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Penguatan Pengawasan di Pemerintah Kota Blitar
3.	Penataan Tatalaksana	1) Pemetaan proses bisnis penyelenggaraan pemerintahan
		2) Penyusunan mekanisme kerja antar OPD 3) Penyusunan/perbaikan SOP (termasuk SOP pengawasan dan penyusunan laporan) 4) Penyusunan/penyempurnaan rencana penerapan teknologi informasi pada sektor – sektor yang belum menerapkan 5) Pelaksanaan pengembangan dan penerapan teknologi informasi pada sektor-sektor yang belum menerapkan 6) Penerapan keterbukaan informasi publik 7) Penyusunan pedoman standart analisa biaya 8) Penerapan dan pelaporan SPM 9) Penyusunan Peraturan Walikota tentang tata kelola teknologi informasi dan komunikasi 10) Monitoring 11) Evaluasi 12) Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi 13) Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Penataan Tatalaksana Pemerintah Kota Blitar

Program	Kegiatan
4. Penguatan Akuntabilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1) Review rencana strategis pemerintah daerah 2) Penyempurnaan sasaran, indikator kinerja dan perjanjian kinerja untuk tahun berikutnya 3) Penyusunan rencana perbaikan sistem manajemen kinerja 4) Penyempurnaan sistem manajemen kinerja 5) Pelaksanaan manajemen kinerja 6) Integrasi sistem manajemen kinerja dengan Sistem Penilaian Prestasi Kerja Pegawai 7) Pengumpulan, perbaruan, dan pengelolaan data kinerja 8) Monitoring 9) Evaluasi 10) Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi 11) Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Penguatan Akuntabilitas di Pemerintah Kota Blitar
5. Peningkatan Kualitas Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1) Survey kepuasan masyarakat terhadap berbagai jenis pelayanan 2) Identifikasi kebutuhan perbaikan manajemen pelayanan 3) Penyusunan rencana peningkatan kualitas pelayanan menyangkut : penyederhanaan proses, percepatan pelayanan, efisiensi biaya, perubahan perilaku petugas pelayanan, penggunaan teknologi informasi, mekanisme koordinasi antar instansi yang terkait, penyatuan dalam pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), pelaksanaan penerapan OSS, dan perubahan berbagai peraturan perundangan daerah yang dianggap

Program		Kegiatan
		menghambat
		4) Penerapan teknologi informasi
		5) Pelaksanaan perbaikan manajemen pelayanan untuk peningkatan kualitas pelayanan (termasuk penyusunan standar pelayanan, maklumat pelayanan, pengelolaan pengaduan, dan sertifikasi internasional)
		6) Monitoring
		7) Evaluasi
		8) Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi
6.	Quick Wins	
	Pilot Project Pengembangan sistem e gov yang terintegrasi antara e planning dan e budgeting	<p>1. Updating Fitur menu E planning (fitur Musyawarah kelurahan dan musyawarah Kecamatan);</p> <p>2. Sosialisasi dan Uji coba fitur Musrenbang Kelurahan dan kecamatan;</p> <p>3. Penyempurnaan Fitur E planning (musren Kelurahan dan Musren Kecamatan);</p> <p>4. Updating Fitur menu E planning (fitur Musrenbang Kota, RENJA - RKPD);</p> <p>5. Sosialisasi dan Uji coba fitur Musrenbang Kota, RENJA – RKPD;</p> <p>6. Penyempurnaan Fitur Musrenbang Kota, RENJA – RKPD;</p> <p>7. Updating Fitur menu Eplanning (fitur KUA - PPAS) ;</p> <p>8. Sosialisasi dan Uji coba fitur KUA – PPAS;</p> <p>9. Penyempurnaan Fitur KUA – PPAS;</p> <p>10. Integrasi Eplanning dan Ebudgeting (Pendampingan);</p> <p>11. Penyempurnaan integrasi Eplanning - Ebudgeting (pendampingan)</p> <p>12. Pendampingan Operasional Eplanning</p>

Program	Kegiatan
	13.Penerapan sistem;
	14.Monitoring
	15.Evaluasi
	16.Tindak lanjut perbaikan;
1) Penerapan PTSP	(1). Pengkajian penerapan PTSP dan OSS antara lain : penguatan peran dan fungsi PTSP dalam layanan OSS serta pengkajian percepatan layanan OSS di Kota Blitar.
	(2). Penentuan jenis pelayanan yang dapat diintegrasikan dalam PTSP dalam waktu singkat (dilakukan secara terintegrasi dengan kegiatan nomor 3) program Peningkatan Kualitas Pelayanan)
	(3). Penyusunan rancangan PTSP (menyangkut kelembagaan, mekanisme koordinasi/proses bisnis, SOP, prosedur pelayanan, pengaturan kewenangan, diskresi, kebutuhan SDM, penggunaan teknologi informasi, lokasi, sarana dan prasarana, kompetensi pegawai, dan lainnya)
	(4). Monitoring
	(5). Evaluasi
	(6). Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi
	(7). Pemeliharaan dan pengembangan secara berkelanjutan untuk menjamin dan menjaga kualitas pelayanan yang baik
2) Penetapan Quick Wins untuk tahun berikutnya	(1). Identifikasi pelayanan strategis yang dapat dijadikan quick wins tahun berikutnya;
	(2). Perancangan quick wins untuk pelayanan strategis yang dipilih
	(3). Uji coba
	(4). Penyempurnaan hasil uji coba
	(5). Sosialisasi
	(6). Penerapan
	(7). Monitoring
	(8). Evaluasi

	Program	Kegiatan
		(9). Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi (10). Pemeliharaan dan pengembangan secara berkelanjutan untuk menjamin dan menjaga kualitas pelayanan yang baik
7.	Zona Integritas	(1). Penyiapan Kecamatan Kepanjenkidul, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta RSD Mardi Waluyo sebagai unit yang ditetapkan untuk Zona Integritas Menuju WBK/WBBM; (2). Pencanaan rencana Zona Integritas Menuju WBK/WBBM; (3). Pelaksanaan pendampingan 4 OPD untuk penilaian Zona Integritas Menuju WBK/WBBM; (4). Monitoring (5). Evaluasi (6). Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dalam rangka Zona Integritas Menuju WBK/WBBM untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.
8.	Manajemen Perubahan	Disusun secara terpisah dalam rencana manajemen perubahan
9.	Penataan Peraturan Perundang-undangan	Ditentukan sesuai kondisi dan dinamika pelaksanaan reformasi birokrasi yang akan
10.	Penguatan dan Penataan Organisasi	dijalankan hingga tahun 2021

4. Prioritas SKPD

Kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan target-target pada masing-masing OPD diserahkan pada masing-masing yang bertanggungjawab dan OPD yang terkait sebagai rangkaian dari penyusunan rencana aksi OPD dimaksud dalam melakukan reformasi birokrasi.

Bagi OPD yang terkait dengan prioritas daerah dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan juga harus melaksanakan upaya untuk mewujudkan target-target dimaksud.

D. Rencana Aksi

Berdasarkan kegiatan-kegiatan yang telah diuraikan di atas, maka disusun rencana aksi sebagaimana tersebut dalam lampiran road map ini.

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

A. Monitoring

Monitoring berbagai pelaksanaan kegiatan sebagaimana diuraikan dalam rencana aksi dilakukan melalui media sebagai berikut:

Pada tingkat OPD, pelaksanaan monitoring dilakukan terutama dalam kaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas pemerintah daerah yang melekat pada OPD tertentu, dan prioritas yang menjadi fokus dari OPD sebagaimana tertuang dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:

1. Pertemuan rutin yang dipimpin langsung oleh Kepala OPD;
2. Survey rutin, khusus terkait dengan bidang tugas atau pelayanan yang dilaksanakan oleh masing-masing OPD. Setidaknya survey dilakukan setahun sekali;
3. Survey rutin secara online.
4. Pengelolaan pengaduan.
5. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan.
6. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi.

Pada tingkat Pemerintah daerah, pelaksanaan monitoring dilakukan terhadap seluruh program dan kegiatan sebagaimana direncanakan dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:

1. Pertemuan rutin dalam lingkup masing-masing kelompok kerja yang telah dibentuk, sedikitnya satu kali dalam sebulan.
2. Pertemuan rutin dalam lingkup pleno dengan seluruh kelompok kerja yang dipimpin oleh ketua pelaksana reformasi birokrasi.
3. Survey rutin melalui internet untuk mengetahui indeks kualitas pelayanan yang dipersepsikan oleh masyarakat.
4. Pengelolaan pengaduan.
5. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan.
6. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi oleh masing-masing kelompok kerja pada rapat pleno.

Mekanisme monitoring dilakukan sebagai berikut:

Pada lingkup OPD, mekanisme dilakukan sebagai berikut:

1. Setiap unit kerja/koordinator yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing OPD, wajib melakukan monitoring secara terus menerus terhadap kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
2. Hasil monitoring dilaporkan kepada Kepala OPD secara rutin. Jika terdapat hal penting yang perlu segera ditindaklanjuti, maka dapat langsung dilaporkan kepada Kepala OPD;
3. Kepala OPD bersama tim di OPD, wajib merumuskan langkah-langkah perbaikan dan melakukan tindak lanjut atas dasar langkah-langkah perbaikan yang sudah dirumuskan;
4. Permasalahan tidak dapat dipecahkan dalam lingkup OPD, maka permasalahan dapat dibawa pada tingkat kelompok kerja dan pleno;
5. Seluruh hasil monitoring disampaikan kepada kelompok kerja Monitoring dan evaluasi yang koordinasikan oleh Inspektorat Daerah.

Pada lingkup pemerintah Kota, mekanisme dilakukan sebagai berikut:

1. Setiap kelompok kerja wajib melakukan monitoring secara terus menerus terhadap pelaksanaan kegiatan dalam rangka reformasi birokrasi Pemerintah Kota Blitar yang menjadi tanggungjawabnya;
2. Hasil monitoring dibahas dalam tingkat kelompok kerja dan disampaikan kepada Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah;
3. Hasil monitoring dibahas dalam rapat pleno untuk diputuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan;
4. Kelompok kerja melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai tindak lanjut hasil keputusan rapat pleno;
5. Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah memantau pelaksanaan tindak lanjut.

B. Evaluasi

Evaluasi berbagai pelaksanaan kegiatan sebagaimana diuraikan dalam rencana aksi dilakukan melalui media sebagai berikut:

Pada tingkat OPD, pelaksanaan evaluasi dilakukan terutama dalam kaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas pemerintah daerah yang melekat pada OPD tertentu, dan prioritas yang menjadi fokus dari OPD sebagaimana tertuang dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:

1. Pertemuan rutin yang dipimpin langsung oleh Kepala OPD setidaknya setiap enam bulan sekali;
2. Survey rutin, khusus terkait dengan bidang tugas atau pelayanan yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD. Setidaknya survey dilakukan setahun sekali;
3. Survey rutin secara online.
4. Pengelolaan pengaduan.
5. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan setiap enam bulan sekali.
6. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi dalam enam bulan sekali.

Pada tingkat Pemerintah daerah, pelaksanaan evaluasi dilakukan terhadap seluruh program dan kegiatan sebagaimana direncanakan dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:

1. Pertemuan rutin dalam lingkup masing-masing kelompok kerja yang telah dibentuk, enam bulan sekali sebelum dilakukan rapat pleno.
2. Pertemuan rutin dalam lingkup pleno dengan seluruh kelompok kerja yang dipimpin oleh ketua pelaksana reformasi birokrasi, paling tidak dilakukan enam bulan sekali.
3. Survey rutin melalui internet untuk mengetahui indeks kualitas pelayanan yang dipersepsikan oleh masyarakat.
4. Pengelolaan pengaduan.
5. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan setiap enam bulan.

6. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi oleh masing-masing kelompok kerja pada rapat pleno yang dilakukan untuk evaluasi seluruh kegiatan reformasi birokrasi.

Mekanisme evaluasi dilakukan sebagai berikut:

Pada lingkup OPD, mekanisme dilakukan sebagai berikut:

1. Setiap unit kerja/koordinator yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing OPD, wajib melakukan evaluasi setiap enam bulan sekali terhadap kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
2. Hasil evaluasi dilaporkan kepada Kepala OPD.
3. Kepala OPD bersama tim di OPD, wajib merumuskan langkah-langkah perbaikan dan melakukan tindak lanjut atas dasar langkah-langkah perbaikan yang sudah dirumuskan;
4. Permasalahan tidak dapat dipecahkan dalam lingkup OPD, maka permasalahan dapat dibawa pada tingkat kelompok kerja dan pleno;
5. Seluruh hasil evaluasi disampaikan kepada Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang koordinasikan oleh Inspektorat Daerah.

Pada lingkup pemerintah kota, mekanisme dilakukan sebagai berikut:

1. Setiap kelompok kerja wajib melakukan evaluasi setiap enam bulan sekali terhadap pelaksanaan kegiatan dalam rangka reformasi birokrasi Pemerintah Kota Blitar yang menjadi tanggungjawabnya;
2. Hasil evaluasi dibahas dalam tingkat kelompok kerja dan disampaikan kepada Kelompok Kerja Monitoring Dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah;
3. Hasil monitoring dibahas dalam rapat pleno untuk diputuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan;
4. Kelompok kerja melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai tindak lanjut hasil keputusan rapat pleno;
5. Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah memantau pelaksanaan tindak lanjut.

BAB V

PENUTUP

Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Blitar 2018 – 2022 merupakan dokumen perencanaan reformasi birokrasi yang akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran Pemerintah Kota Blitar. Dokumen ini tidak memiliki makna jika seluruh rencana aksi yang tertuang didalamnya tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana dan target-target yang telah ditetapkan. Karena itu, diinstruksikan kepada seluruh kelompok kerja dan SKPD untuk melaksanakan berbagai rencana aksi yang tertuang didalam dokumen ini sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing dengan tetap memperhatikan koordinasi dan sinergi lintas sektor sehingga terjalin keterpaduan pelaksanaannya.

Penyusunan rencana aksi dalam dokumen Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Blitar 2018 – 2022 dilakukan dengan memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan dan kemampuan pemerintah Kota Blitar dalam merespon harapan dimaksud. Meskipun rencana aksi ini sudah menguraikan secara detail langkah-langkah reformasi birokrasi yang direncanakan, namun dalam praktiknya berbagai langkah baru yang sifatnya strategis dapat ditambahkan untuk menjawab berbagai permasalahan strategis yang harus dipecahkan. Karena itu fungsi monitoring dan evaluasi sangat penting dalam upaya untuk terus melakukan upaya perbaikan berkelanjutan. Setiap individual pegawai, pejabat, anggota tim reformasi birokrasi, setiap unit kerja harus terus menerus berupaya untuk melakukan upaya-upaya perbaikan dalam rangka mewujudkan sasaran reformasi birokrasi.

Upaya reformasi birokrasi merupakan upaya yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Kota Blitar harus terus dibangun untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Blitar telah komitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara bersungguh-sungguh.

LAMPIRAN 1

Rencana Aksi Reformasi Birokrasi

Pemerintah Kota Blitar

Tahun 2018

Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Blitar Tahun 2018

No	Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1.	Peningkatan Sistem Manajemen SDM Aparatur 1) Analisis Jabatan	Dokumen hasil analisis jabatan 1 Dokumen	a. Penyusunan rencana pelaksanaan Anjab														Bagian Hukum dan Organisasi, BKD	
			b. Pelaksanaan Anjab															
			c. Penyusunan Hasil															
			d. Penerapan hasil pada jabatan															
			e. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring															
			f. Evaluasi															
			g. Tindaklanjut hasil evaluasi	2019														
	2) Analisis beban Kerja	Dokumen hasil analisis beban kerja 1 Dokumen	a. Penyusunan rencana pelaksanaan ABK															Bagian Hukum dan Organisasi, BKD
			b. Pelaksanaan ABK															
			c. Penyusunan Hasil															
			d. Penerapan hasil pada jabatan dan kebutuhan pegawai															
			e. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring															
			f. Evaluasi															
			g. Tindaklanjut hasil evaluasi	2019														
	3) Penyusunan ulang/ penyempurnaan standar kompetensi jabatan	Dokumen standar kompetensi jabatan 1 dokumen	a. Penyusunan rencana penyempurnaan standar kompetensi jabatan															BKD, Bagian Hukum dan Organisasi
			b. Pelaksanaan penyusunan standar kompetensi jabatan															
			c. Penyusunan hasil															
			d. Penerapan hasil pada jabatan															
			e. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring															
f. Evaluasi																		
g. Tindaklanjut hasil evaluasi			2019															
4) Penyusunan rencana kebutuhan pegawai sesuai beban kerja dan kompetensi yang dibutuhkan masing - masing OPD (termasuk rencana rekrutmen setiap tahun dan lima tahunan)	Dokumen rencana kebutuhan pegawai 1 dokumen	a. Penyusunan rencana Pelaksanaan Penyusunan rencana kebutuhan pegawai															BKD, Bagian Hukum dan Organisasi	
		b. Penyusunan rencana kebutuhan pegawai																
		c. Penerapan hasil pada rekrutmen																
		d. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring																
		e. Evaluasi																
		f. Tindak lanjut hasil evaluasi	2019															

No	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait			
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
5)	Penyempurnaan sistem rekrutmen pegawai	Sistem rekrutmen	a. Penyusunan rencana penyempurnaan sistem rekrutmen	■													BKD		
		1 kerjasama	b. Kajian Kerjasama penggunaan sistem		■	■	■												
			c. Kerjasama sistem baru					■	■	■									
			d. Uji coba								■	■							
6)	Pelaksanaan rekrutmen dengan sistem baru	% CPNS yang direkrut sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan	a. Pelaksanaan rekrutmen dengan sistem baru											■	■	■	BKD		
		80%	b. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring											■	■	■			
			c. Evaluasi															■	
			d. Tindaklanjut hasil evaluasi	2019															
7)	Penerapan sistem rekrutmen terbuka untuk jabatan-jabatan tertentu	% pejabat yang direkrut sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan	a. Penyusunan rencana penerapan sistem rekrutmen terbuka untuk jabatan-jabatan tertentu	■													BKD		
		80%	b. Penentuan jabatan-jabatan yang akan dibuka		■														
			c. Penerapan sistem dalam lingkup internal Pemda			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	
			d. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■	■
			e. Evaluasi								■								
			f. Tindaklanjut hasil evaluasi									■	■	■	■	■		■	■
8)	Pelaksanaan assessment kompetensi terhadap seluruh pegawai	% pegawai yang di assess	g. Penyusunan rencana assessment	■													BKD		
		70%	h. Pelaksanaan assessment		■	■	■												
			i. Penyusunan hasil assessment						■										
			j. Penggunaan hasil assessment untuk pengelolaan SDM							■	■	■	■	■	■	■		■	
			e. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring								■	■	■	■	■	■		■	
			f. Evaluasi															■	
			g. Tindaklanjut hasil evaluasi	2019															
9)	Penyusunan kebutuhan dan rencana pengembangan pegawai meliputi kepemimpinan, managerial, fungsional dan teknis (training need)	Dokumen rencana pengembangan pegawai	a. Penyusunan rencana pengembangan pegawai											■			BKD		
		1 dokumen	b. Penyusunan rencana kebutuhan pengembangan pegawai												■	■		■	■

No	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait				
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
	10) Pelaksanaan pengembangan pegawai sesuai kebutuhan			2019												BKD				
	11) Penyusunan rencana penempatan dan pola karier pegawai			2019												BKD				
12)	Penyusunan sistem manajemen kinerja pegawai	Sistem manajemen kinerja	a. Penyusunan rencana penyusunan sistem manajemen kinerja pegawai	■														BKD		
		1 sistem	b. Penyusunan Sistem Manajemen kinerja pegawai	■	■	■														
			c. Uji coba			■														
			d. Penyempurnaan hasil uji coba			■	■													
13)	Penerapan sistem manajemen kinerja pegawai	% OPD yang menerapkan Sistem	a. Penerapan sistem manajemen kinerja pegawai						■	■	■	■	■	■	■	■	■	BKD		
		100%	b. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
			c. Evaluasi																■	
			d. Tindaklanjut hasil evaluasi																	2019
14)	Sosialisasi berbagai kebijakan kepegawaian dan merencanakan penerapannya	Jumlah sosialisasi	a. Penyusunan rencana sosialisasi	■														Bagian Hukum dan Organisasi dan BKD		
		3 kali	b. Pelaksanaan sosialisasi			■				■				■						
			c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring			■														
			d. Evaluasi																	■
			e. Tindaklanjut hasil evaluasi																	
15)	Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring seluruh kegiatan program SDM	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target	a. Monitoring terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan program SDM	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	Bagian Hukum dan Organisasi dan BKD		
		80%	b. Tindak lanjut hasil monitoring	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			
16)	Evaluasi seluruh kegiatan dalam program SDM	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target	Evaluasi terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan program SDM									■						Bagian Hukum dan Organisasi dan BKD		
		80%																		
17)	Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi seluruh	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target	a. Tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi										■	■	■	■		Bagian Hukum dan Organisasi		

No	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
6)	Penyusunan rencana monitoring pengelolaan keuangan untuk seluruh SKPD	Opini BPK	Penyusunan rencana monitoring													Inspektorat Daerah BPKAD	
		WTP															
7)	Sosialisasi tertib administrasi keuangan	Opini BPK	Sosialisasi tertib administrasi													Inspektorat Daerah BPKAD	
		WTP															
8)	Pelaksanaan pengawasan pengelolaan keuangan di SKPD	Opini BPK	a. Review laporan keuangan daerah													Inspektorat Daerah BPKAD	
		WTP	b. Review dokumen perencanaan dan penganggaran														
			c. Pengawasan dan monitoring penatausahaan dan pengelolaan keuangan														
9)	Pelaksanaan Whistle Blowing System	Prosentase pelaksanaan Whistle Blowing System yang ditindaklanjuti	a. Penyusunan aturan dan kebijakan Whistle Blowing System													Inspektorat Daerah	
			b. Sosialisasi aturan dan kebijakan Whistle Blowing System														
		100%	c. Penerapan														
			d. Monev														
10)	Pengendalian Gratifikasi	Presentase pelaporan gratifikasi yang ditindaklanjuti	a. Sosialisasi kebijakan dan pelaporan gratifikasi													Inspektorat Daerah	
		100%	b. Monitoring gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Blitar														
11)	Pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan	OPD yang menyusun kebijakan penanganan benturan kepentingan dan identifikasi benturan kepentingan	a. Penyusunan kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan													Inspektorat Daerah	
		4 OPD	b. Penyusunan identifikasi Benturan Kepentingan														
12)	Sosialisasi LHKPN	Prosentase pejabat yang telah menyerahkan LHKPN	Sosialisasi LHPKN													Inspektorat Daerah BKD	
		80%															
13)	Asistensi penyusunan LHKPN bagi pejabat	Prosentase pejabat yang telah menyerahkan LHKPN	a. Asistensi penyusunan LHKPN bagi pejabat													Inspektorat Daerah BKD	
		80%	b. Monitoring penyerahan LHKPN														
14)	Penyusunan rencana pengembangan sarana pengaduan	Prosentase pengaduan yang berhasil ditindaklanjuti	Penyusunan rencana pengembangan sarana pengaduan penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN													Inspektorat Daerah	

No	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN	100%															
15)	Penerapan sarana pengaduan penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN	Prosentase pengaduan yang berhasil ditindaklanjuti 100%	Penerapan sarana pengaduan penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN														Inspektorat Daerah
16)	Tindak lanjut pengaduan informasi indikasi terjadinya KKN	Prosentase pengaduan yang berhasil ditindaklanjuti 100%	Tindak lanjut pengaduan informasi indikasi terjadinya KKN														Inspektorat Daerah
17)	Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring seluruh kegiatan pada Program Penguatan Pengawasan	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target 80%	a. Hasil Monitoring b. Tindak lanjut hasil monitoring														Inspektorat Daerah
18)	Evaluasi seluruh kegiatan dalam program Penguatan Pengawasan	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target 80%	Evaluasi seluruh kegiatan dalam program Penguatan Pengawasan														Inspektorat Daerah
19)	Tindak lanjut hasil evaluasi seluruh kegiatan dalam program Penguatan Pengawasan	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target 80%	a. Tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi b. Perbaiki kegiatan-kegiatan program penguatan pengawasan														Inspektorat Daerah
20)	Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Penguatan Pengawasan	% hasil monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti melalui penetapan prioritas, dan kegiatan baru 100%	a. Identifikasi berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan untuk tahun berikutnya sesuai hasil evaluasi b. Penyusunan prioritas c. Penetapan kegiatan yang akan dilakukan d. Perbaiki/penyusunan kembali/ pencantuman kegiatan dalam rencana aksi tahun berikutnya														Inspektorat Daerah
3.	Penataan Tatalaksana																
1)	Pemetaan proses bisnis penyelenggaraan pemerintahan	Persentase OPD yang telah menyusun proses bisnis sesuai tupoksi 37 %	a. Penyusunan rencana Pemetaan proses bisnis penyelenggaraan pemerintahan b. Pelaksanaan pemetaan														Bagian Hukum dan Organisasi dan Bagian

No	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	11) Evaluasi seluruh kegiatan dalam program Penataan Tatalaksana	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target 80%	Evaluasi seluruh kegiatan dalam program Penataan Tatalaksana														Bagian Tata Pemerintahan
	12) Tindak lanjut hasil evaluasi seluruh kegiatan pada Program Penataan Tatalaksana tahun 2018	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target 80%	a. Tindak lanjut terhadap hasil evaluasi b. Perbaiki kegiatan-kegiatan program Penataan Tatalaksana														Bagian Tata Pemerintahan
	13) Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Penataan Tata Laksana	% hasil monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti melalui penetapan prioritas, dan kegiatan baru 100%	a. Identifikasi berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan untuk tahun berikutnya sesuai hasil evaluasi b. Penyusunan prioritas c. Penetapan kegiatan yang akan dilakukan d. Perbaikan/penyusunan kembali/ pencantuman kegiatan dalam rencana aksi tahun berikutnya														Bagian Tata Pemerintahan
4.	Penguatan Akuntabilitas																
	1) Review rencana strategis pemerintah daerah	Nilai akuntabilitas kinerja A	a. Penyusunan rencana review renstra dan perbaikannya b. Review rencana strategis pemerintah daerah														Bappeda Bagian Tata Pemerintahan dan Inspektorat Daerah
	2) Penyempurnaan sasaran, indikator kinerja dan perjanjian kinerja	Nilai akuntabilitas kinerja A	a. Penyempurnaan sasaran, indikator kinerja dan perjanjian kinerja b. Penerapan sasaran indikator kinerja dan perjanjian kinerja yang sudah direview c. Monitoring penerapan dan tindak lanjut hasil monitoring d. Evaluasi hasil penerapan e. Tindak lanjut hasil evaluasi														Bappeda Bagian Tata Pemerintahan dan Inspektorat Daerah
	3) Penyusunan rencana perbaikan sistem manajemen kinerja	Nilai akuntabilitas kinerja A	Penyusunan rencana perbaikan sistem manajemen kinerja														Bagian Tata Pemerintahan
	4) Penyempurnaan sistem manajemen kinerja	Nilai akuntabilitas kinerja A	Penyempurnaan sistem manajemen kinerja														Bagian Tata Pemerintahan

No	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5)	Pelaksanaan manajemen kinerja	Nilai akuntabilitas kinerja	a. Pelaksanaan manajemen kinerja													Bagian Tata Pemerintahan
		A	b. Monitoring penerapan dan tindak lanjut hasil monitoring													
			c. Evaluasi hasil penerapan													
			d. Tindak lanjut hasil evaluasi													
6)	Integrasi sistem manajemen kinerja dengan Sistem Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (Sistem Manajemen Kinerja Pegawai)	Prosentase pegawai yang capaian kerjanya sesuai target	a. Integrasi sistem manajemen kinerja dengan Sistem Penilaian Prestasi Kerja Pegawai (Sistem Manajemen Kinerja Pegawai)												Bagian Tata Pemerintahan dan BKD	
		70%	b. Monitoring penerapan dan tindak lanjut hasil monitoring													
			c. Evaluasi hasil penerapan													
			d. Tindak lanjut hasil evaluasi													
7)	Pengumpulan, perbaruan, dan pengelolaan data kinerja	Nilai akuntabilitas kinerja	a. Penyusunan rencana Pengumpulan, perbaruan, dan pengelolaan data kinerja												Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
		A	b. Pengumpulan, perbaruan, dan pengelolaan data kinerja													
			c. Monitoring Pengumpulan, perbaruan, dan pengelolaan data kinerja dan tindak lanjut hasil monitoring													
			d. Evaluasi hasil penerapan													
			e. Tindak lanjut hasil evaluasi													
8)	Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring seluruh kegiatan pada Program Penguatan Akuntabilitas	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target	a. Monitoring terhadap seluruh kegiatan pada Program Penguatan Akuntabilitas											Bagian Tata Pemerintahan		
		80%	b. Tindak lanjut hasil monitoring seluruh kegiatan pada Program Penguatan Akuntabilitas													
9)	Evaluasi terhadap seluruh kegiatan pada Program Penguatan Akuntabilitas	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target	Evaluasi terhadap seluruh kegiatan pada Program Penguatan Akuntabilitas											Bagian Tata Pemerintahan		
10)	Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target	a. Tindak lanjut hasil evaluasi seluruh kegiatan pada Program Penguatan Akuntabilitas											Bagian Tata Pemerintahan		
		80%	b. Perbaikan kegiatan-kegiatan program Penguatan Akuntabilitas													
11)	Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-	% hasil mnitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti melalui penetapan prioritas, dan kegiatan baru	a. Identifikasi berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan untuk tahun berikutnya sesuai hasil evaluasi											Bagian Tata Pemerintahan		

No	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait		
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Penguatan Akuntabilitas Aparatur	100%	b. Penyusunan prioritas c. Penetapan kegiatan yang akan dilakukan d. Perbaikan/penyusunan kembali/ pencantuman kegiatan dalam rencana aksi tahun berikutnya															
5.	Peningkatan Kualitas Pelayanan																	
	1) Survey kepuasan masyarakat terhadap berbagai jenis pelayanan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Baik	a. Penyusunan rencana survey kepuasan masyarakat terhadap seluruh jenis pelayanan b. Penyusunan instrumen survey dan uji cobanya c. Pelaksanaan survey d. Pengolahan data dan analisis hasil survey e. Penyusunan rekomendasi															Bagian Tata Pemerintahan
	2) Identifikasi kebutuhan perbaikan manajemen pelayanan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Baik	Identifikasi kebutuhan perbaikan manajemen pelayanan pada masing-masing jenis pelayanan															Bagian Tata Pemerintahan
	3) Penyusunan rencana peningkatan kualitas pelayanan menyangkut : penyederhanaan proses, percepatan pelayanan, efisiensi biaya, perubahan perilaku petugas pelayanan, penggunaan teknologi informasi, mekanisme koordinasi antar instansi yang terkait, penyatuan dalam pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), dan perubahan berbagai peraturan perundangan daerah yang dianggap menghambat	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Baik	a. Penyusunan rencana peningkatan kualitas pelayanan untuk seluruh jenis pelayanan sesuai dengan rekomendasi dan identifikasi kebutuhan perbaikan manajemen pelayanan b. Penyusunan kerangka peningkatan kualitas pelayanan menyangkut : penyederhanaan proses, percepatan pelayanan, efisiensi biaya, perubahan perilaku petugas pelayanan, penggunaan teknologi informasi, mekanisme koordinasi antar instansi yang terkait, penyatuan dalam pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), dan perubahan berbagai peraturan perundangan daerah yang dianggap menghambat															Bagian Tata Pemerintahan dan Bagian Hukum dan Organisasi Bagian Hukum dan Organisasi dan Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP

No	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait		
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
4)	Pengkajian penerapan PTSP	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	a. Pengkajian penerapan PTSP														Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Hukum dan Organisasi dan Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP	
		Baik	b. Penyusunan kerangka sistem PTSP															
			c. Penyusunan rencana penerapan															
			d. Uji coba Penerapan PTSP sesuai rencana															
			e. Monitoring dan tindak lanjut penerapan															
			f. Evaluasi															
			g. Tindak lanjut hasil evaluasi	2019														
5)	Pengembangan PTSP	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	a. Penerapan PTSP hasil rumusan (sebagaimana dihasilkan dari kegiatan nomor 4)														Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Hukum dan Organisasi dan Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP	
		Baik	b. Monitoring dan tindak lanjut penerapan															
			c. Evaluasi															
			d. Tindak lanjut hasil evaluasi	2019														
6)	Penerapan teknologi informasi	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	a. Penyusunan rencana penerapan teknologi informasi pada sistem pelayanan (diselaraskan dengan kegiatan nomor 1 Program Penataan Tatalaksana)														Bagian Tata Pemerintahan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	
		Baik	b. Identifikasi user requirement															
			c. Uji coba sistem															
			d. Penerapan teknologi informasi pada jenis pelayanan															
			e. Monitoring dan tindak lanjut penerapan															
			f. Evaluasi															
			g. Tindak lanjut hasil evaluasi	2019														
7)	Pelaksanaan perbaikan manajemen pelayanan untuk peningkatan kualitas pelayanan (termasuk penyusunan standar pelayanan, maklumat pelayanan, pengelolaan pengaduan, dan sertifikasi internasional)	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	a. Pelaksanaan perbaikan manajemen pelayanan sesuai dengan kerangka peningkatan kualitas pelayanan sebagaimana dihasilkan dari kegiatan nomor 3														Bagian Tata Pemerintahan	
		Baik	b. Monitoring dan tindak lanjut perbaikan manajemen pelayanan															
			c. Evaluasi															
			d. Tindak lanjut hasil evaluasi	2019														

No	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			f. Monitoring dan evaluasi														
	(4). Monitoring	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah	a. Monitoring														
		70%	b. Tindaklanjut hasil monitoring														
	(5). Evaluasi	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah	Evaluasi														
		70%															Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan PTSP dan Bagian Hukum dan Organisasi
	(6) Tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah	a. Tindak lanjut terhadap hasil evaluasi	2019													
		70%	b. Perbaikan terhadap sistem untuk pelaksanaan tahun berikutnya														
7.	Zona Integritas Menuju WBK/WBBM																
	(1). Penyiapan: 1. Kecamatan Kepanjenkidul 2. Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 4. RSD Mardi Waluyo sebagai unit yang ditetapkan untuk Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;	Jumlah Unit Kerja yang ditetapkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM 2	Penyiapan unit yang ditetapkan untuk Zona Integritas Menuju WBK/WBBM														Inspektorat dan Tim ZI
	(2). Pencanangan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;	Jumlah Unit Kerja yang ditetapkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM 2	Pencanangan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM														
	(3). Pelaksanaan pendampingan 4 OPD untuk penilaian Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemda 70%	Pelaksana Pendampingan 4 OPD untuk penilaian Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di 2 OPD terpilih														Inspektorat

LAMPIRAN 2

Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Blitar Tahun 2019

No	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Pengawasan di Pemerintah Kota Blitar																
3.	Penataan Tatalaksana																
	1) Pemetaan dan penyempurnaan proses bisnis penyelenggaraan pemerintahan	Persentase OPD yang telah menyusun proses bisnis sesuai tupoksi 74%	a. Invebtarisasi ulang/ reviu pemetaan proses bisnis penyelenggaraan pemerintahan b. Penyusunan proses bisnis OPD c. Monitoring dan evaluasi hasil proses bisnis OPD														Bagian Tata Pemerintahan dan Bagian Hukum & Organisasi
	2) Pelaksanaan/penerapan mekanisme kerja antar SKPD	Persentase kasus tumpang tindih tugas dan fungsi yang diselesaikan 80%	a. Penerapan mekanisme kerja b. Monitoring penerapan dan tindak lanjut hasil monitoring c. Evaluasi hasil penerapan d. Tindak lanjut hasil evaluasi hasil evaluasi														
	3) Penyusunan/perbaikan SOP (seluruh OPD))	Prosentase SOP penyelenggaraan pemerintahan yang diterapkan 90 %	a. Penyusunan SOP baru/ penyempurnaan SO yang ada di OPD b. Penerapan SOP di OPD c. Monitoring penerapan dan tindak lanjut hasil monitoring d. Evaluasi hasil penerapan e. Tindak lanjut hasil evaluasi														Bagian Tata Pemerintahan
	4) Penyempurnaan e-government	Nilai Survey kepuasan masyarakat baik	a. Penyempurnaan e-government b. Lanjutan integrasi penerapan e-government c. Monitoring dan tindaklanjut hasil monitoring d. Evaluasi e. Tindaklanjut hasil evaluasi														Dinas Kominfotik
	5) Pelaksanaan OSS untuk mendukung PTSP	Nilai Survey kepuasan masyarakat baik	a. Penyempurnaan rencana penerapan OSS b. Lanjutan penerapan OSS c. Monitoring dan tindaklanjut hasil monitoring d. Evaluasi														Dinas Penanaman Modal, Naker dan PTSP

No	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait		
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
			e. Tindaklanjuti hasil evaluasi															
6)	Pelaksanaan pengembangan teknologi informasi pada sektor-sektor yang belum menerapkan	Prosentase jenis pelayanan publik yang sudah menerapkan teknologi informasi 50%	a. Identifikasi user requirement untuk semua jenis pelayanan yang akan dibuatkan sistemnya														Dinas Kominfotik	
			b. Pelaksanaan pengembangan teknologi informasi pada sektor-sektor yang belum menerapkan														Dinas Kominfo SKPD	
			c. Uji coba Sistem															
			d. Monitoring uji coba dan tindak lanjut hasil monitoring															
			e. Evaluasi uji coba penerapan															
			f. Tindak lanjut hasil evaluasi uji coba penerapan	2020														
7)	Lanjutan Penerapan keterbukaan informasi publik	Nilai Survey kepuasan masyarakat baik	a. Penerapan keterbukaan informasi publik														Dinas Kominfo SKPD	
			b. Monitoring penerapan dan tindak lanjut hasil monitoring															
			c. Evaluasi hasil penerapan															
			d. Tindak lanjut hasil evaluasi															
8)	Penerapan pedoman standart biaya	Prosentase biaya yang distandarisasikan 75%	a. Penerapan standarisasi biaya														BPKAD	
			b. Monitoring penerapan dan tindak lanjut hasil monitoring															
			c. Evaluasi hasil penerapan															
			d. Tindak lanjut hasil evaluasi															
9)	Penerapan dan Pelaporan SPM	Prosentase pemenuhan SPM Layanan dasar 90 %	a. Monitoring dan Evaluasi Penerapan SPM Layanan dasar														Bagian Tata Pemerintahan	
			b. Pelaporan dan Tindak lanjut															
10)	Pelaksanaan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi	Prosentase pemenuhan sarana prasarana TI Kota Blitar 75%	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemenuhan sarana prasarana TI Kota Blitar														Dinas Kominfotik	
11)	Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring seluruh kegiatan pada Program Penataan Tatalaksana tahun 2019	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target 80%	a. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring														Bagian Tata Pemerintahan	
			b. Tindak lanjut hasil monitoring															
12)	Evaluasi seluruh	% kegiatan yang dilaksanakan	Evaluasi seluruh kegiatan dalam program Penataan														Bagian Tata	

No	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3)	Review rencana dan kerangka peningkatan kualitas pelayanan menyangkut : penyederhanaan proses, percepatan pelayanan, efisiensi biaya, perubahan perilaku petugas pelayanan, penggunaan teknologi informasi, mekanisme koordinasi antar instansi yang terkait, penyatuan dalam pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), dan perubahan berbagai peraturan perundangan daerah yang dianggap menghambat	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	a. Review rencana peningkatan kualitas pelayanan untuk seluruh jenis pelayanan esuai dengan rekomendasi dan identifikasi kebutuhan perbaikan manajemen pelayanan													Bagian tata Pemerintahan, Bagian Hukum dan Organisasi serta OPD
		baik	b. Pelaksanaan peningkatan kualitas pelayanan menyangkut : penyederhanaan proses, percepatan pelayanan, efisiensi biaya, perubahan perilaku petugas pelayanan, penggunaan teknologi informasi, mekanisme koordinasi antar instansi yang terkait, penyatuan dalam pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), dan perubahan berbagai peraturan perundangan daerah yang dianggap menghambat													
4)	Pengkajian penerapan PTSP	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	a. Pengkajian penerapan PTSP	Sudah dilaksanakan tahun 2018												Bagian tata Pemerintahan, Bagian Hukum dan Organisasi serta OPD
		baik	b. Penyusunan kerangka sistem PTSP lanjutan													
			c. Penyusunan rencana penerapan lanjutan													
			d. Penerapan PTSP sesuai rencana lanjutan													
			e. Monitoring dan tindak lanjut penerapan													
			f. Evaluasi													
			g. Tindak lanjut hasil evaluasi													
5)	Lanjutan pelaksanaan PTSP untuk Quick Wins	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	a. Lanjutan Penerapan PTSP sebagai Quick wins												Bagian tata Pemerintahan, Bagian Hukum dan Organisasi serta OPD	
		baik	b. Monitoring dan tindak lanjut penerapan													
			c. Evaluasi													
			d. Tindak lanjut hasil evaluasi													
6)	Pengembangan PTSP (quick wins) untuk seluruh jenis pelayanan administratif	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	a. Penyusunan rencana pengembangan PTSP untuk seluruh jenis pelayanan administratif												Bagian tata Pemerintahan, Bagian Hukum dan Organisasi serta OPD	

No	Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		perangkat daerah 70%														
	(5). Penerapan sistem	Prosentase ketersediaan layanan aplikasi e gov pada perangkat daerah 70%	Penerapan sistem													
	(6). Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring	% aktivitas penerapan sistem yang dilaksanakan sesuai target 90%	a. Monitoring pelaksanaan sistem													Bappeda, BPKAD
			b. Tindak lanjut terhadap hasil monitoring													
	(7). Evaluasi	% aktivitas penerapan sistem yang dilaksanakan sesuai target 90%	Evaluasi terhadap penerapan sistem													
			a. Pemeliharaan/ pengembangan sistem													Bappeda, BPKAD
	(8). Pemeliharaan/Pengembangan sistem e gov yang terintegrasi antara e planning dan e budgeting	% aktivitas penerapan sistem yang dilaksanakan sesuai target 90%	b. Lanjutan penerapan sistem e gov yang terintegrasi antara e planning dan e budgeting													
	2) Penerapan PTSP															
	(1). Pengkajian penerapan PTSP (dilakukan secara terintegrasi dengan kegiatan nomor 4) program Peningkatan Kualitas Pelayanan)		Diintegrasikan ke dalam kegiatan nomor 4 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan												Bagian Tata pemerintahan, Bagian Hukum dan Organisasi, Dinas Penanaman Modal, Naker dan PTSP	
	(2). Penentuan jenis pelayanan yang dapat diintegrasikan dalam PTSP dalam waktu singkat		Diintegrasikan ke dalam kegiatan nomor 4 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan													
	(3). Penyusunan rancangan PTSP (menyangkut kelembagaan, mekanisme koordinasi/proses bisnis, SOP,		Diintegrasikan ke dalam kegiatan nomor 4 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan													

No	Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	prosedur pelayanan, pengaturan kewenangan, diskresi, kebutuhan SDM, penggunaan teknologi informasi, lokasi, sarana dan prasarana, kompetensi pegawai, dan lainnya)																
	(4). Uji coba		Diintegrasikan ke dalam kegiatan nomor 4 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan														
	(5). Penyempurnaan hasil uji coba		Diintegrasikan ke dalam kegiatan nomor 4 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan														
	(6). Sosialisasi																
	(7). Lanjutan Penerapan PTSP Quick Wins	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat baik	Lanjutan Penerapan PTSP														
	(8). Monitoring	% aktivitas penerapan sistem yang dilaksanakan sesuai target 90%	a. Monitoring														
			b. Tindaklanjut hasil monitoring														
	(9). Evaluasi	% aktivitas penerapan sistem yang dilaksanakan sesuai target 90%	Evaluasi														
	(10). Pemeliharaan dan pengembangan PTSP Quick Wins untuk jenis-jenis pelayanan yang diperluas	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat baik	Pemeriharaan PTSP yang sudah berjalan baik														
Pengembangan PTSP untuk jenis-jenis pelayanan baru																	
Penerapan PTSP																	
7.	Zona Integritas Menuju WBK/WBBM																
	(1). Penguatan 2 OPD sebagai unit yang ditetapkan untuk Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;	Jumlah Unit Kerja yang ditetapkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM 2	Penguatan 2 OPD sebagai unit yang akan ditetapkan untuk Zona Integritas Menuju WBK/WBBM														Inspektorat Daerah

No	Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	(2). Pencanaan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM lanjutan ;	Jumlah Unit Kerja yang ditetapkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM 2	Pencanaan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM														
	(3). Pelaksana Zona Integritas Menuju WBK/WBBM	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemda 80%	a. Pelaksana Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Kecamatan Kidul dan RSUD Mardi Waluyo b. Pelaksana Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di 2 OPD														
	(4). Monitoring	% aktivitas penerapan sistem yang dilaksanakan sesuai target 90%	a. Monitoring b. Tindaklanjut hasil monitoring														Inspektorat Daerah
	(5). Evaluasi	% aktivitas penerapan sistem yang dilaksanakan sesuai target 90%	Evaluasi														
	(6). Tindak lanjut perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dalam rangka WBK/WBBM untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.	% aktivitas penerapan sistem yang dilaksanakan sesuai target 90%	a. Tindak lanjut terhadap hasil evaluasi b. Perbaikan terhadap sistem untuk pelaksanaan tahun berikutnya														Inspektorat Daerah
	(7). Penyiapan OPD lain sebagai Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada tahun berikutnya	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat baik	a. Penyusunan rencana penetapan Zona Integritas menuju WBK/WBBM untuk OPD lainnya b. Penetapan OPD untuk menerapkan Zona Integritas menuju WBK/WBBM														
8.	Penataan Peraturan Perundang-undangan																
	(1). Lanjutan Penataan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelayanan dalam	% dari Jumlah kebi-jakan baru yang diter-bitkan sebagai peng-ganti peraturan perund-dangan yang dipandang menghambat pelayanan 60%	a. Identifikasi berbagai peraturan perundangan daerah yang dipandang menghambat pelayanan dan menghambat penerapan PTSP b. Penyusunan rencana pembahasan penataan	Sudah dilakukan tahun 2018												Bagian Hukum dan Organisasi dan Dinas Penanaman Modal, naker dan PTSP	

No	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait		
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	rangka mendukung penerapan PTSP untuk seluruh pelayanan administratif		c. Lanjutan Perumusan kebijakan perubahan untuk peraturan yang dipandang menghambat pelayanan dan menghambat penerapan PTSP															
			d. Penetapan kebijakan															
			e. Implementasi															
	(2). Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring	% aktivitas penerapan sistem yang dilaksanakan sesuai target 90%	a. Monitoring														Bagian Hukum dan Organisasi dan Dinas Penanaman Modal, naker dan PTSP	
	(3). Evaluasi	% aktivitas penerapan sistem yang dilaksanakan sesuai target 90%	b. Tindaklanjut hasil monitoring															
	(4). Tindak lanjut hasil evaluasi	% aktivitas penerapan sistem yang dilaksanakan sesuai target 90%	Tidaklanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi														Bagian Hukum dan Organisasi dan Dinas Penanaman Modal, naker dan PTSP	
			Perbaikan terhadap pelaksanaan berbagai kegiatan dalam lingkup Program Penataan Peraturan Perundang-undangan															
	(5). Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Penataan Peraturan Perundang-undangan di Pemerintah Kota blitar	% hasil mnitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti melalui penetapan prioritas, dan kegiatan baru 100%	a. Identifikasi berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan untuk tahun berikutnya sesuai hasil evaluasi															
			b. Penyusunan prioritas															
			c. Penetapan kegiatan yang akan dilakukan															
			d. Perbaikan/penyusunan kembali/ pencantuman kegiatan dalam rencana aksi tahun berikutnya															
9.	Penguatan dan Penataan Organisasi																	
	1) Penataan organisasi yang terkait dengan pelayanan dalam	Jumlah organisasi yang ditata	a. Lanjutan Pelaksanaan perubahan kebijakan yang dianggap menghambat pelayanan dan menghambat penerapan PTSP														Bagian Hukum dan Organisasi dan Dinas	

LAMPIRAN 3

Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Blitar Tahun 2020

No	Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			g. Tindaklanjut hasil evaluasi													
11)	Updating training need untuk tahun 2018 - 2019	Dokumen rencana pengembangan pegawai 1 dokumen	a. Penyusunan rencana penyusunan kebutuhan pengembangan pegawai b. Penyusunan rencana kebutuhan pengembangan pegawai	Sudah dilakukan tahun 2018												BKD
12)	Lanjutan Pelaksanaan pengembangan pegawai sesuai kebutuhan	% pegawai yang mengikuti pengembangan pegawai 30%	a. Pelaksanaan pengembangan pegawai b. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring pelaksanaan pengembangan pegawai													BKD
			c. Evaluasi d. Tindak lanjut hasil evaluasi													
13)	Lanjutan Penerapan rencana penempatan dan pola karier	% pejabat yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan 100%	a. Penerapan rencana penerapan dan sistem pola karier pada Sistem Manajemen SDM b. Pembaruan data rencana penempatan dan pola karier c. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring d. Evaluasi e. Tindaklanjut hasil evaluasi													BKD
14)	Penyusunan sistem manajemen kinerja pegawai	Sistem manajemen kinerja 1 sistem	a. Penyusunan rencana penyusunan sistem manajemen kinerja pegawai b. Penyusunan Sistem Manajemen kinerja pegawai c. Uji coba d. Penyempurnaan hasil uji coba	Sudah disusun tahun 2018 dan disempurnakan di tahun 2019												BKD
15)	Lanjutan Penerapan sistem manajemen kinerja pegawai	% OPD yang menerapkan Sistem 100%	a. Penerapan sistem manajemen kinerja pegawai b. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring c. Evaluasi d. Tindaklanjut hasil evaluasi													BKD
16)	Sosialisasi berbagai kebijakan kepegawaian dan merencanakan penerapannya	Jumlah sosialisasi 3 kali	a. Penyusunan rencana sosialisasi b. Pelaksanaan sosialisasi													Bagian Hukum dan Organisasi dan BKD

No	Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		8 OPD	c. Penyusunan rencana tindak pengendalian													
	5) Monev/ Penilaian SPIP	% OPD pada level terdefinisi 70%	Evaluasi penerapan SPIP dan penilaian maturitasi OPD													
	6) Penyusunan rencana monitoring pengelolaan keuangan untuk seluruh SKPD untuk tahun 2020	Opini BPK WTP	Penyusunan rencana monitoring													Inspektorat Daerah
	7) Sosialisasi tertib administrasi keuangan	Opini BPK	Sosialisasi tertib administrasi													Inspektorat Daerah
		WTP														
	8) Pelaksanaan pengawasan pengelolaan keuangan	Opini BPK WTP	a. Review laporan keuangan daerah b. Review dokumen perencanaan dan penganggaran													
			c. Pengawasan dan monitoring penatausahaan dan pengelolaan keuangan													
	9) Pelaksanaan Whistle Blowing System	Prosentase pelaksanaan Whistle Blowing System yang ditindaklanjuti	a. Sosialisasi aturan dan kebijakan Whistle Blowing System													
		100%	b. Penerapan Whistle Blowing System													
			c. Monev													
	10) Pelaksanaan Penanganan Benturan Kepentingan	OPD yang menyusun kebijakan penanganan benturan kepentingan dan identifikasi benturan kepentingan	a. Penyusunan kebijakan Penanganan Benturan Kepentingan													
		6 OPD	b. Penyusunan identifikasi Benturan Kepentingan													
	11) Pengendalian Gratifikasi	Presentase pelaporan gratifikasi yang ditindaklanjuti	a. Sosialisasi kebijakan dan pelaporan gratifikasi													
		100%	b. Monitoring gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Blitar													
	12) Sosialisasi LHKPN	Prosentase pejabat yang telah menyerahkan LHKPN	Sosialisasi LHPKN	Sudah dilaksanakan tahun 2018												
		100%		Sudah dilaksanakan tahun 2018												
	13) Asistensi penyusunan LHKPN bagi pejabat	Prosentase pejabat yang telah menyerahkan LHKPN	a. Asistensi penyusunan LHKPN bagi pejabat	Sudah dilaksanakan tahun 2018												
		100%	b. Monitoring penyerahan LHKPN	Sudah dilaksanakan tahun 2018												

No	Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
14)	Penyusunan rencana pengembangan sarana pengaduan penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN	Prosentase pengaduan yang berhasil ditindaklanjuti 85%	Penyusunan rencana pengembangan sarana pengaduan penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN	Sudah disusun/dilaksanakan tahun 2018												Inspektorat Daerah	
15)	Lanjutan Penerapan sarana pengaduan penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN	Prosentase pengaduan yang berhasil ditindaklanjuti 85%	Penerapan sarana pengaduan penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN														Inspektorat Daerah
16)	Tindak lanjut pengaduan informasi indikasi terjadinya KKN	Prosentase pengaduan yang berhasil ditindaklanjuti 85%	Tindak lanjut pengaduan informasi indikasi terjadinya KKN														Inspektorat Daerah
17)	Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring seluruh kegiatan pada Program Penguatan Pengawasan tahun 2020	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target 80%	a. Hasil Monitoring b. Tindak lanjut hasil monitoring														Inspektorat Daerah
18)	Evaluasi seluruh kegiatan dalam program Penguatan Pengawasan tahun 2020	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target 80%	Evaluasi seluruh kegiatan dalam program Penguatan Pengawasan														
19)	Tindak lanjut hasil evaluasi seluruh kegiatan dalam program Penguatan Pengawasan tahun 2019 dan 2020	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target 80%	a. Tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi tahun 2019 dan 2020 b. Perbaiki kegiatan-kegiatan program penguatan pengawasan														Inspektorat Daerah
20)	Pelaksanaan berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan sebagai tindak lanjut sebagaimana telah diidentifikasi pada tahun 2020	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target 80%	Pelaksanaan berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan sebagai tindak lanjut sebagaimana telah diidentifikasi pada tahun 2020														
21)	Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Penguatan Pengawasan di Pemerintah Kota Blitar	% hasil monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti melalui penetapan prioritas, dan kegiatan baru 100%	a. Identifikasi berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan untuk tahun berikutnya sesuai hasil evaluasi b. Penyusunan prioritas c. Penetapan kegiatan yang akan dilakukan d. Perbaikan/penyusunan kembali/ pencantuman kegiatan dalam rencana aksi tahun berikutnya														Inspektorat Daerah

No	Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	Penguatan Akuntabilitas tahun 2020	80%															
10)	Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi tahun 2019 – 2020	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target	a. Tindaklanjut hasil evaluasi seluruh kegiatan pada Program Penguatan Akuntabilitas														Bagian Tata Pemerintahan
		80%	b. Perbaikan kegiatan-kegiatan program Penguatan Akuntabilitas														Bagian Tata Pemerintahan
11)	Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Penguatan Akuntabilitas Aparatur di Pemerintah Kota Blitar	% hasil mnitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti melalui penetapan prioritas, dan kegiatan baru 100%	a. Identifikasi berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan untuk tahun berikutnya sesuai hasil evaluasi b. Penyusunan prioritas c. Penetapan kegiatan yang akan dilakukan d. Perbaikan/penyusunan kembali/ pencantuman kegiatan dalam rencana aksi tahun berikutnya														
5.	Peningkatan Kualitas Pelayanan																
1)	Survey kepuasan masyarakat terhadap berbagai jenis pelayanan	Nilai Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah Kota Blitar baik	a. Penyusunan rencana survey kepuasan masyarakat terhadap seluruh jenis pelayanan b. Penyusunan/penyempurnaan instrumen survey dan uji cobanya c. Pelaksanaan survey d. Pengolahan data dan analisis hasil survey e. Penyusunan rekomendasi														Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Hukum dan Organisasi dan Dinas Penanaman Modal, Naker dan PTSP
2)	Identifikasi kebutuhan perbaikan manajemen pelayanan	Nilai Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah Kota Blitar baik	Identifikasi kebutuhan perbaikan manajemen pelayanan pada masing-masing jenis pelayanan														
3)	Penyusunan rencana dan kerangka peningkatan kualitas pelayanan menyangkut : penyederhanaan proses, percepatan pelayanan, efisiensi biaya, perubahan	Nilai Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah Kota Blitar baik	a. Penyusunan rencana peningkatan kualitas pelayanan untuk seluruh jenis pelayanan esuai dengan rekomendasi dan identifikasi kebutuhan perbaikan manajemen pelayanan b. Penyusunan kerangka peningkatan kualitas pelayanan menyangkut : penyederhanaan proses, percepatan pelayanan, efisiensi biaya, perubahan	Sudah dilaksanakan tahun 2018 dan 2019													

No	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	perilaku petugas pelayanan, penggunaan teknologi informasi, mekanisme koordinasi antar instansi yang terkait, penyatuan dalam pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), dan perubahan berbagai peraturan perundangan daerah yang dianggap menghambat		perilaku petugas pelayanan, penggunaan teknologi informasi, mekanisme koordinasi antar instansi yang terkait, penyatuan dalam pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), dan perubahan berbagai peraturan perundangan daerah yang dianggap menghambat														
4)	Pengkajian penerapan PTSP	Nilai Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah Kota Blitar	a. Pengkajian penerapan PTSP b. Penyusunan kerangka sistem PTSP c. Penyusunan rencana penerapan d. Penerapan PTSP sesuai rencana	Sudah dilaksanakan tahun 2018 dan 2019												Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Hukum dan Organisasi dan Dinas Penanaman Modal, Naker dan PTSP	
		baik	e. Monitoring dan tindak lanjut penerapan f. Evaluasi g. Tindak lanjut hasil evaluasi	Sudah dilaksanakan tahun 2018 dan 2019													
5)	Lanjutan pelaksanaan PTSP untuk Quick Wins	Nilai Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah Kota Blitar	a. Lanjutan Penerapan PTSP sebagai Quick wins b. Monitoring dan tindak lanjut penerapan c. Evaluasi	Sudah dilaksanakan 2018 -2019												Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Hukum dan Organisasi dan Dinas Penanaman Modal, Naker dan PTSP	
		baik	d. Tindak lanjut hasil evaluasi	Sudah dilaksanakan 2018 -2019													
6)	Pengembangan dan pemeliharaan PTSP untuk seluruh jenis pelayanan administratif	Nilai Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah Kota Blitar	a. Pelaksanaan PTSP b. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring c. Evaluasi														
		baik	d. Tindak lanjut hasil evaluasi														
7)	Penerapan teknologi informasi	Nilai Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah Kota Blitar	a. Penyusunan rencana penerapan teknologi informasi pada sistem pelayanan (diselaraskan dengan kegiatan nomor 6 Program Penataan Tatalaksana) b. Identifikasi user requirement c. Uji coba sistem d. Penerapan teknologi informasi pada jenis pelayanan yang masuk PTSP dan menjadi quick wins) e. Monitoring dan tindak lanjut penerapan f. Evaluasi g. Tindak lanjut hasil evaluasi	Sudah dilakukan tahun 2018 dan 2019												Bagian Tata Pemerintahan, Dinas Kominfotik	

LAMPIRAN 4

Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Blitar Tahun 2021

No	Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
20)	Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring seluruh kegiatan program SDM	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target	a. Monitoring terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan program SDM													BKD
		80%	b. Tindak lanjut hasil monitoring													
21)	Evaluasi seluruh kegiatan dalam program SDM	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target	Evaluasi terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan program SDM													BKD
		80%														
22)	Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi seluruh kegiatan dalam program SDM yang telah dilakukan pada tahun 2021	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target	a. Tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi kegiatan tahun 2021													BKD
		80%	b. Perbaikan kegiatan-kegiatan program SDM yang telah dilaksanakan pada tahun 2021													
23)	Pelaksanaan berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan sebagai tindak lanjut sebagaimana telah diidentifikasi pada tahun 2020	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target	Pelaksanaan berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan sebagai tindak lanjut sebagaimana telah diidentifikasi pada tahun 2021													
		80%														
24)	Penyusunan prioritas baru tahun 2022 serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Peningkatan Manajemen SDM Aparatur Pemerintah Kota Blitar	% hasil monitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti melalui penetapan prioritas, dan kegiatan baru	a. Identifikasi berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan pada tahun 2022 sesuai hasil evaluasi													BKD
		100%	b. Penyusunan prioritas													
			c. Penetapan kegiatan yang akan dilakukan													
			d. Perbaikan/penyusunan kembali/ pencantuman kegiatan dalam rencana aksi tahun berikutnya													
2.	Penguatan Pengawasan															
	1) Review penyempurnaan rencana kebutuhan tenaga auditor	Sudah disusun tahun 2018												Inspektorat Daerah BKD		

No	Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
8)	Monitoring dan tindaklanjut hasil monitoring seluruh kegiatan pada Program Penguatan Akuntabilitas 2021	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target	a. Monitoring terhadap seluruh kegiatan pada Program Penguatan Akuntabilitas													Bagian Tata Pemerintahan	
		80%	b. Tindaklanjut hasil monitoring seluruh kegiatan pada Program Penguatan Akuntabilitas														
9)	Evaluasi terhadap seluruh kegiatan pada Program Penguatan Akuntabilitas tahun 2021	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target	Evaluasi terhadap seluruh kegiatan pada Program Penguatan Akuntabilitas													Bagian Tata Pemerintahan	
		80%															
10)	Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi tahun 2020 - 2021	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target	a. Tindaklanjut hasil evaluasi seluruh kegiatan pada Program Penguatan Akuntabilitas													Bagian Tata Pemerintahan	
		80%	b. Perbaikan kegiatan-kegiatan program Penguatan Akuntabilitas														
11)	Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Penguatan Akuntabilitas Aparatur di Pemerintah Kota Blitar	% hasil mnitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti melalui penetapan prioritas, dan kegiatan baru	a. Identifikasi berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan untuk tahun berikutnya sesuai hasil evaluasi													Bagian Tata Pemerintahan	
		100%	b. Penyusunan prioritas														
			c. Penetapan kegiatan yang akan dilakukan														
			d. Perbaikan/penyusunan kembali/ pencantuman kegiatan dalam rencana aksi tahun berikutnya														
5.	Peningkatan Kualitas Pelayanan																
1)	Survey kepuasan masyarakat terhadap berbagai jenis pelayanan	Nilai Survey kepuasan masyarakat	a. Penyusunan rencana survey kepuasan masyarakat terhadap seluruh jenis pelayanan													Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Hukum dan Organisasi dan Dinas Penanaman Modal, Naker dan PTSP	
		baik	b. Penyusunan/penyempurnaan instrumen survey dan uji cobanya														
			c. Pelaksanaan survey														
			d. Pengolahan data dan analisis hasil survey														
			e. Penyusunan rekomendasi														
2)	Identifikasi kebutuhan perbaikan manajemen pelayanan	Nilai Survey kepuasan masyarakat	Identifikasi kebutuhan perbaikan manajemen pelayanan pada masing-masing jenis pelayanan														
3)	Penyusunan rencana dan kerangka peningkatan kualitas pelayanan menyangkut :	Nilai Survey kepuasan masyarakat	a. Penyusunan rencana peningkatan kualitas pelayanan untuk seluruh jenis pelayanan esuai dengan rekomendasi dan identifikasi kebutuhan perbaikan manajemen pelayanan	Sudah dilaksanakan tahun 2018 dan 2019													

No	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	penyederhanaan proses, percepatan pelayanan, efisiensi biaya, perubahan perilaku petugas pelayanan, penggunaan teknologi informasi, mekanisme koordinasi antar instansi yang terkait, penyatuan dalam pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), dan perubahan berbagai peraturan perundangan daerah yang dianggap menghambat	baik	b. Penyusunan kerangka peningkatan kualitas pelayanan menyangkut : penyederhanaan proses, percepatan pelayanan, efisiensi biaya, perubahan perilaku petugas pelayanan, penggunaan teknologi informasi, mekanisme koordinasi antar instansi yang terkait, penyatuan dalam pelayanan terpadu satu pintu (PTSP), dan perubahan berbagai peraturan perundangan daerah yang dianggap menghambat														
4)	Pengkajian penerapan PTSP	Nilai Survey kepuasan masyarakat	a. Pengkajian penerapan PTSP	Sudah dilaksanakan tahun 2018 dan 2019												Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Hukum dan Organisasi dan Dinas Penanaman Modal, Naker dan PTSP	
		baik	b. Penyusunan kerangka sistem PTSP	Sudah dilaksanakan tahun 2018 dan 2019													
			c. Penyusunan rencana penerapan														
			d. Penerapan PTSP sesuai rencana														
			e. Monitoring dan tindak lanjut penerapan														
			f. Evaluasi														
			g. Tindak lanjut hasil evaluasi														
5)	Lanjutan pelaksanaan PTSP untuk Quick Wins	Nilai Survey kepuasan masyarakat	a. Lanjutan Penerapan PTSP sebagai Quick wins	Sudah dilaksanakan 2018 -2019													
			b. Monitoring dan tindak lanjut penerapan														
			c. Evaluasi														
		baik	d. Tindak lanjut hasil evaluasi														
6)	Pengembangan dan pemeliharaan PTSP untuk seluruh jenis pelayanan administratif	Nilai Survey kepuasan masyarakat	a. Pelaksanaan PTSP														
		baik	b. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring														
			c. Evaluasi														
			d. Tindak lanjut hasil evaluasi														
7)	Penerapan teknologi informasi	Nilai Survey kepuasan masyarakat	a. Penyusunan rencana penerapan teknologi informasi pada sistem pelayanan (diselaraskan dengan kegiatan nomor 6 Program Penataan Tatalaksana)	Sudah dilakukan tahun 2018 dan 2019												Bagian Tata Pemerintahan, Dinas Kominfotik	
		baik	b. Identifikasi user requirement														
			c. Uji coba sistem														
			d. Penerapan teknologi informasi pada jenis pelayanan yang masuk PTSP dan menjadi quick wins)														
			e. Monitoring dan tindak lanjut penerapan														
			f. Evaluasi														
			g. Tindak lanjut hasil evaluasi														
8)	Lanjutan Pelaksanaan	Nilai Survey kepuasan	a. Lanjutan Pelaksanaan perbaikan manajemen														Bagian Tata

No	Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	perbaikan manajemen pelayanan untuk peningkatan kualitas pelayanan sebagai tindak lanjut hasil evaluasi tahun 2021	masyarakat	pelayanan sesuai dengan kerangka peningkatan kualitas pelayanan sebagaimana dihasilkan dari kegiatan nomor 2													Pemerintahan
		baik	b. Monitoring dan tindak lanjut perbaikan manajemen pelayanan													
			c. Evaluasi													
			d. Tindak lanjut hasil evaluasi													
9)	Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring seluruh kegiatan program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target	a. Monitoring terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik													Bagian Tata Pemerintahan
		80%	b. Tindak lanjut hasil monitoring seluruh kegiatan program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik													
10)	Evaluasi terhadap seluruh kegiatan program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target	Evaluasi terhadap seluruh kegiatan program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik													
		80%														
11)	Tindak lanjut perbaikan hasil monitoring dan evaluasi	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target	a. Tindak hasil evaluasi seluruh kegiatan program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik													Bagian Tata Pemerintahan
		80%	b. Perbaikan pelaksanaan kegiatan program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik													
12)	Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Pemerintah Kota blitar	% hasil mnitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti melalui penetapan prioritas, dan kegiatan baru	a. Identifikasi berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan untuk tahun berikutnya sesuai hasil evaluasi													Bagian Tata Pemerintahan
		100%	b. Penyusunan prioritas													
			c. Penetapan kegiatan yang akan dilakukan													
			d. Perbaikan/penyusunan kembali/ pencantuman kegiatan dalam rencana aksi tahun berikutnya													
6.	Quick Wins															
	1) Pilot Project Pengembangan sistem e gov yang terintegrasi antara e planning dan e budgeting															
	(1). Identifikasi user requirement sistem sistem e gov yang terintegrasi antara e	Prosentase ketersediaan layanan aplikasi e gov pada	Updating Fitur menu e gov yang terintegrasi antara e planning dan e budgeting	Sudah dilakukan tahun 2018 dan 2019												Bappeda dan BPKAD

No	Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	planning dan e budgeting	perangkat daerah 80%														
	(1). Penyusunan sistem	Prosentase ketersediaan layanan aplikasi e gov pada perangkat daerah 70%	Penyusunan sistem	Sudah dilakukan tahun 2018 dan 2019												
	(2). Ujicoba sistem	Prosentase ketersediaan layanan aplikasi e gov pada perangkat daerah 70%	Ujicoba sistem	Sudah dilakukan tahun 2018 dan 2019												
	(3). Penyempurnaan sistem	Prosentase ketersediaan layanan aplikasi e gov pada perangkat daerah 70%	Penyempurnaan sistem	Sudah dilakukan tahun 2018 dan 2019												
	(4). Penerapan sistem	Prosentase ketersediaan layanan aplikasi e gov pada perangkat daerah 70%	Penerapan sistem	Sudah mulai dilakukan tahun 2018 dan 2019												
	(5). Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring	% aktivitas penerapan sistem yang dilaksanakan sesuai target 90%	a. Monitoring pelaksanaan sistem	Sudah dilakukan tahun 2018												Bappeda dan BPKAD
			b. Tindak lanjut terhadap hasil monitoring													
	(6). Evaluasi	% aktivitas penerapan sistem yang dilaksanakan sesuai target 90%	Evaluasi terhadap penerapan sistem	Sudah dilakukan tahun 2018												Bappeda dan BPKAD
			% aktivitas penerapan sistem yang dilaksanakan sesuai target 90%	a. Pemeliharaan/ pengembangan sistem												
			b. Lanjutan penerapan sistem e gov yang terintegrasi antara e planning dan e budgeting													
	1) Penerapan PTSP															
	(1). Pengkajian penerapan PTSP			Sudah dilakukan tahun 2018 dan 2019												Bagian Tata

No	Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	(1). Lanjutan Penataan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelayanan dalam rangka mendukung penerapan PTSP untuk seluruh pelayanan administratif	% dari Jumlah kebijakan baru yang diterbitkan sebagai pengganti peraturan perundang yang dipandang menghambat pelayanan	a. Identifikasi berbagai peraturan perundang daerah yang dipandang menghambat pelayanan dan menghambat penerapan PTSP	Sudah mulai dilakukan tahun 2018												Bagian Hukum dan Organisasi dan Dinas Penanaman Modan, Naker dan PTSP	
			b. Penyusunan rencana pembahasan penataan	Sudah dilakukan tahun 2018													
			c. Lanjutan Perumusan ke-bijakan perubahan untuk peraturan yang dipandang menghambat pelayanan dan meng-hambat penerapan PTSP														
			d. Penetapan kebijakan														
			e. Implementasi														
	(2). Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring	% aktivitas penerapan sistem yang dilaksanakan sesuai target	a. Monitoring													Bagian Hukum dan Organisasi dan Dinas Penanaman Modan, Naker dan PTSP	
			b. Tindaklanjut hasil monitoring														
	(3). Evaluasi	% aktivitas penerapan sistem yang dilaksanakan sesuai target	Evaluasi														
	(4). Tindak lanjut hasil evaluasi	% aktivitas penerapan sistem yang dilaksanakan sesuai target	Tidaklanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi													Bagian Hukum dan Organisasi dan Dinas Penanaman Modan, Naker dan PTSP	
			Perbaikan terhadap pelaksanaan berbagai kegiatan dalam lingkup Program Penataan Peraturan Perundang-undangan														
	(5). Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Penataan Peraturan Perundang-undangan di Pemerintah Kota blitar	% hasil mnitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti melalui penetapan prioritas, dan kegiatan baru	a. Identifikasi berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan untuk tahun berikutnya sesuai hasil evaluasi														
			b. Penyusunan prioritas														
			c. Penetapan kegiatan yang akan dilakukan														
			d. Perbaikan/penyusunan kembali/pencantuman kegiatan dalam rencana aksi tahun berikutnya														
9.	Penguatan dan Penataan Organisasi																
	1) Penataan organisasi yang terkait dengan pelayanan	Jumlah organisasi yang ditata	a. Lanjutan Pelaksanaan perubahan kebijakan yang dianggap menghambat pelayanan dan												Bagian Hukum dan Organisasi		

LAMPIRAN 5

Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Blitar Tahun 2022

No	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			Kepentingan														
	12) Pengendalian Gratifikasi	Presentase pelaporan gratifikasi yang ditindaklanjuti	a. Sosialisasi kebijakan dan pelaporan gratifikasi														
		100%	b. Monitoring gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kota Blitar														
	13) Asistensi penyusunan LHKPN bagi pejabat	Prosentase pejabat yang telah menyerahkan LHKPN	a. Asistensi lanjutan penyusunan LHKPN bagi pejabat	Sudah dilaksanakan tahun 2018													
		100%	b. Monitoring penyerahan LHKPN														
	14) Penyusunan rencana pengembangan sarana pengaduan penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN	Prosentase pengaduan yang berhasil ditindaklanjuti	Penyusunan rencana pengembangan sarana pengaduan penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN	Sudah disusun/dilaksanakan tahun 2018												Inspektorat Daerah	
		85%															
	15) Lanjutan Penerapan sarana pengaduan penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN	Prosentase pengaduan yang berhasil ditindaklanjuti	Penerapan sarana pengaduan penyampaian informasi indikasi terjadinya KKN	Sudah disusun/dilaksanakan tahun 2019 dan 2020												Inspektorat Daerah	
		85%															
	16) Tindak lanjut pengaduan informasi indikasi terjadinya KKN	Prosentase pengaduan yang berhasil ditindaklanjuti	Tindak lanjut pengaduan informasi indikasi terjadinya KKN														Inspektorat Daerah
		85%															
	17) Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring seluruh kegiatan dalam Program Penguatan Pengawasan tahun 2022	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target	a. Hasil Monitoring														Inspektorat Daerah
		80%	b. Tindak lanjut hasil monitoring														
	18) Evaluasi seluruh kegiatan dalam program Penguatan Pengawasan tahun 2022	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target	Evaluasi seluruh kegiatan dalam program Penguatan Pengawasan														
		80%															
	19) Tindak lanjut hasil evaluasi seluruh kegiatan dalam program Penguatan Pengawasan tahun 2021 dan 2022	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target	a. Tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi tahun 2021 dan 2022														Inspektorat Daerah
		80%	b. Perbaiki kegiatan-kegiatan program penguatan pengawasan														
	20) Pelaksanaan berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan sebagai tindak lanjut sebagaimana telah diidentifikasi pada tahun	% kegiatan yang dilaksanakan sesuai target	Pelaksanaan berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan sebagai tindak lanjut sebagaimana telah diidentifikasi pada tahun 2022														
		80%															

No	Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	2022																
	21) Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Penguatan Pengawasan di Pemerintah Kota blitar	% hasil mnitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti melalui penetapan prioritas, dan kegiatan baru 100%	a. Identifikasi berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan untuk tahun berikutnya sesuai hasil evaluasi b. Penyusunan prioritas c. Penetapan kegiatan yang akan dilakukan d. Perbaikan/penyusunan kembali/ pencantuman kegiatan dalam rencana aksi tahun berikutnya														Inspektorat Daerah
3.	Penataan Tatalaksana																
	1) Review Pemetaan proses bisnis penyelenggaraan pemerintahan	Persentase kasus tumpang tindih tugas dan fungsi yang diselesaikan 100%	Review Pemetaan proses bisnis penyelenggaraan pemerintahan	SUDAH DILAKSANAKAN TAHUN 2020 DAN 2021												Bagian Tata Pemerintahan dan Bagian Hukum dan Organisasi	
	2) Lanjutan Pelaksanaan/penerapan mekanisme kerja antar OPD	Persentase kasus tumpang tindih tugas dan fungsi yang diselesaikan 100%	a. Penerapan mekanisme kerja b. Monitoring penerapan dan tindak lanjut hasil monitoring c. Evaluasi hasil penerapan d. Tindak lanjut hasil evaluasi hasil evaluasi tahun 2022														
	3) Review SOP seluruh OPD	Persentase SOP penyelenggaraan pemerintahan yang diterapkan 100%	a. Penyusunan SOP baru/ penyempurnaan SOP yang ada di OPD b. Penerapan SOP di OPD c. Monitoring penerapan dan tindak lanjut hasil monitoring d. Evaluasi hasil penerapan e. Tindak lanjut hasil evaluasi tahun 2021 – 2022	SUDAH DILAKSANAKAN TAHUN 2019												Bagian Tata Pemerintahan	
	4) Penyempurnaan e-government	Nilai Survey kepuasan pelayanan masyarakat	a. Penyempurnaan e-government lanjutan a. Lanjutan integrasi penerapan e-government	SUDAH DILAKSANAKAN TAHUN 2019 DAN 2020												Dinas Kominfortik	
				SUDAH DILAKSANAKAN TAHUN 2020 DAN 2021													

No	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	(1). Identifikasi user requirement sistem e gov yang terintegrasi antara e planning dan e budgeting	Prosentase ketersediaan layanan aplikasi e gov pada perangkat daerah 80%	Updating Fitur menu e gov yang terintegrasi antara e planning dan e budgeting	Sudah dilakukan tahun 2018 dan 2019												Bappeda dan BPKAD	
	(1). Penyusunan sistem	Prosentase ketersediaan layanan aplikasi e gov pada perangkat daerah 70%	Penyusunan sistem	Sudah dilakukan tahun 2018 dan 2019													
	(2). Ujicoba sistem	Prosentase ketersediaan layanan aplikasi e gov pada perangkat daerah 70%	Ujicoba sistem	Sudah dilakukan tahun 2018 dan 2019													
	(3). Penyempurnaan sistem	Prosentase ketersediaan layanan aplikasi e gov pada perangkat daerah 70%	Penyempurnaan sistem	Sudah dilakukan tahun 2018 dan 2019													
	(4). Penerapan sistem	Prosentase ketersediaan layanan aplikasi e gov pada perangkat daerah 70%	Penerapan sistem	Sudah mulai dilakukan tahun 2018 dan 2019													
	(5). Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring	% aktivitas penerapan sistem yang dilaksanakan sesuai target 90%	a. Monitoring pelaksanaan sistem	Sudah dilakukan tahun 2018												Bappeda dan BPKAD	
	(6). Evaluasi	% aktivitas penerapan sistem yang dilaksanakan sesuai target 90%	b. Tindak lanjut terhadap hasil monitoring Evaluasi terhadap penerapan sistem	Sudah dilakukan tahun 2018												Bappeda dan BPKAD	
	(7). Pemeliharaan/Pengembangan sistem informasi e gov yang terintegrasi antara e planning dan e budgeting	% aktivitas penerapan sistem yang dilaksanakan sesuai target 90%	a. Pemeliharaan/ pengembangan sistem														Bappeda dan BPKAD
			b. Lanjutan penerapan sistem e gov yang terintegrasi antara e planning dan e budgeting														
	1) Penerapan PTSP																
	(1). Pengkajian penerapan PTSP (dilakukan secara terintegrasi dengan kegiatan nomor 4) program Peningkatan Kualitas Pelayanan)			Sudah dilakukan tahun 2018 dan 2019												Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Hukum dan Organisasi dan Dinas Penanaman	

No	Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	(2). Penentuan jenis pelayanan yang dapat diintegrasikan dalam PTSP dalam waktu singkat			Sudah dilakukan tahun 2018 dan 2019												Modal, Naker dan PTSP		
	(3). Penyusunan rancangan PTSP (menyangkut kelembagaan, mekanisme koordinasi/proses bisnis, SOP, prosedur pelayanan, pengaturan kewenangan, diskresi, kebutuhan SDM, penggunaan teknologi informasi, lokasi, sarana dan prasarana, kompetensi pegawai, dan lainnya)			Sudah dilakukan tahun 2018 dan 2019														
	(4). Uji coba			Sudah dilakukan tahun 2018 dan 2019														
	(5). Penyempurnaan hasil uji coba																	
	(6). Sosialisasi																	
	(7). Lanjutan Penerapan PTSP Quick Wins	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat tentang pelayanan perizinan Baik	Lanjutan Penerapan PTSP	Sudah dilakukan tahun 2018 dan 2019														
	(8). Monitoring	% aktivitas penerapan sistem yang dilaksanakan sesuai target 90%	a. Monitoring b. Tindaklanjut hasil monitoring															
	(9). Evaluasi	% aktivitas penerapan sistem yang dilaksanakan sesuai target 90%	Evaluasi															
	(10). Pemeliharaan dan pengembangan PTSP Quick Wins untuk jenis-jenis pelayanan yang diperluas	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat tentang pelayanan perizinan Baik	Pemeriharaan PTSP yang sudah berjalan baik Penerapan PTSP															
7.	Zona Integritas Menuju WBK/WBBM																	
	(1). Penyiapan 4 SKPD sebagai unit yang ditetapkan untuk Zona Integritas Menuju	Jumlah Unit Kerja yang ditetapkan sebagai Zona Integritas menuju	Penyiapan 4 SKPD sebagai unit yang akan ditetapkan untuk Zona Integritas Menuju WBK/WBBM															Inspektorat Daerah

No	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	WBK/WBBM;	WBK/WBBM														
		4														
	(2). Pencanaan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;	Jumlah Unit Kerja yang ditetapkan sebagai Zona Integritas menuju WBK/WBBM	Pencanaan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM													
		4														
	(3). Pelaksana Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di 10 SKPD yang sudah ditetapkan sebagai ZI dan SKPD yang baru ditetapkan untuk menerapkan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	a. Pelaksana Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di SKPD yang sudah menerapkan ZI													
		Baik	b. Pelaksana Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di 10 SKPD													
	(4). Monitoring	% aktivitas penerapan sistem yang dilaksanakan sesuai target	a. Monitoring													Inspektorat Daerah
		90%	b. Tindaklanjut hasil monitoring													
	(5). Evaluasi	% aktivitas penerapan sistem yang dilaksanakan sesuai target	Evaluasi													Inspektorat Daerah
		90%														
	(6). Tindak lanjut perbaikan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dalam rangka WBK/WBBM untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.	% aktivitas penerapan sistem yang dilaksanakan sesuai target	a. Tindak lanjut terhadap hasil evaluasi													Inspektorat Daerah
		90%	b. Perbaikan terhadap sistem untuk pelaksanaan tahun berikutnya													
	(7). Penyiapan SKPD lain sebagai Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada tahun berikutnya	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pemda	a. Penyusunan rencana penetapan Zona Integritas menuju WBK/WBBM untuk SKPD lainnya													
		70%	b. Penetapan SKPD untuk menerapkan Zona Integritas menuju WBK/WBBM													
8.	Penataan Peraturan Perundang-undangan															
	(1). Lanjutan Penataan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelayanan dalam rangka mendukung	% dari Jumlah kebijakan baru yang diterbitkan sebagai pengganti peraturan perundangan	a. Identifikasi berbagai peraturan perundangan daerah yang dipandang menghambat pelayanan dan menghambat penerapan PTSP	Sudah mulai dilakukan tahun 2018												Bagian Hukum dan Organisasi dan Dinas Penanaman

No	Program/Kegiatan	Indikator	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait
		Target		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	penerapan PTSP untuk seluruh pelayanan administratif	yang dipandang menghambat pelayanan														Modan, Naker dan PTSP
		60%	b. Penyusunan rencana pembahasan penataan	Sudah dilakukan tahun 2018 dan 2019												
			c. Lanjutan Perumusan ke-bijakan perubahan un-tuk peraturan yang dipandang menghambat pelayanan dan meng-hambat penerapan PTSP	Sudah dilakukan tahun 2020 dan 2021												
			d. Penetapan kebijakan													
			e. Implementasi													
	(2). Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring	% aktivitas penerapan sistem yang dilaksanakan sesuai target	a. Monitoring													Bagian Hukum dan Organisasi dan Dinas Penanaman
		90%	b. Tindaklanjut hasil monitoring													Modan, Naker dan PTSP
	(3). Evaluasi	% aktivitas penerapan sistem yang dilaksanakan sesuai target	Evaluasi													
		90%														
	(4). Tindak lanjut hasil evaluasi	% aktivitas penerapan sistem yang dilaksanakan sesuai target	Tidaklanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi													Bagian Hukum dan Organisasi dan Dinas Penanaman
		90%	Perbaikan terhadap pelaksanaan berbagai kegiatan dalam lingkup Program Penataan Peraturan Perundang-undangan													Modan, Naker dan PTSP
	(5). Penyusunan prioritas baru serta kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam rangka mewujudkan target-target prioritas dimaksud sesuai dengan perkembangan kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam program Penataan Peraturan Perundang-undangan di Pemerintah Kota blitar	% hasil mnitoring dan evaluasi yang ditindaklanjuti melalui penetapan prioritas, dan kegiatan baru	a. Identifikasi berbagai kegiatan baru yang perlu dilaksanakan untuk tahun berikutnya sesuai hasil evaluasi													
			b. Penyusunan prioritas													
			c. Penetapan kegiatan yang akan dilakukan													
			d. Perbaikan/penyusunan kembali/pencantuman kegiatan dalam rencana aksi tahun berikutnya													
9.	Penguatan dan Penataan Organisasi															
	1) Penataan organisasi yang terkait dengan pelayanan dalam rangka mendukung penerapan PTSP sebagai	Jumlah organisasi yang ditata	a. Lanjutan Pelaksanaan perubahan kebijakan yang dianggap menghambat pelayanan dan menghambat penerapan PTSP	Sudah dilaksanakan tahun 2020 dan 2021												Bagian Hukum dan Organisasi

No	Program/Kegiatan	Indikator Target	Tahapan	Bulan												Penanggung jawab/SKPD terkait	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	quick wins																
2)	Penataan terhadap tugas dan fungsi yang tumpang tindih	Persentase kasus tumpang tindih tugas dan fungsi yang diselesaikan	a. Penyusunan rencana penataan terhadap tugas dan fungsi dengan dasar hasil pemetaan proses bisnis	Sudah mulai dilaksanakan tahun 2018												Bagian Hukum dan Organisasi	
		80%	b. Perumusan penataan terhadap tugas dan fungsi yang tumpang tindih (termasuk menata kelembagaan)	Sudah mulai dilaksanakan tahun 2018													
			c. Penerapan hasil penataan														
			d. Monitoring dan tindak lanjut hasil monitoring														
			e. Evaluasi														
			f. Tindak lanjut hasil evaluasi														

WAKIL WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR

Plh. Kepala Bagian Hukum & Organisasi

SARI TRIWAHYUNI, S.H.

Penata Tk. I

NIP. 19780420 200501 2 012